ABDUL FATAH HASAN (1912-1948)

Anggota BPUPKI Asal Banten Yang di Buang Belanda di Laut Timor

MUFTI ALI | FARHAN AL-FUADI

Mufti Ali dan Farhan Al-Fuadi

Abdul Fatah Hasan (1912-1948)

Anggota BPUPKI Asal Banten Yang di Buang Belanda di Laut Timor / Mufti Ali dan Farhan Al-Fuadi

viii +119 hlm.; 14,5 x 21 cm

1. Abdul Fatah Hasan (1912-1948)
Anggota BPUPKI Asal Banten Yang di Buang Belanda di Laut Timor 2. Judul

© Bhakti Banten Press 2019

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud daiam pasai 2 ayat (1) atau pasal 4g ayat (1) dan ayat (2) dipidana masing masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda palingsedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000 000.000 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan. memamerkan, mengedarkan. atau menjual kepada umum suatu aptaan atau barang hasii pelanggaran HakCipta atau HakTerkaitsebagaimana dimaksud dalam ayat l1), dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Abdul Fatah Hasan (1912-1948)

Anggota BPUPKI Asal Banten Yang di Buang Belanda di Laut Timor

Mufti Ali, Ph.D

Farhan Al-Fuadi, S.Ud

Bhakti Banten Press

Abdul Fatah Hasan (1912-1948)

Anggota BPUPKI Asal Banten Yang di Buang Belanda di Laut Timor

Penulis:
Mufti Ali, Ph.D Farhan Al-
Fuadi, S.Ud

Penata Letak & Desain Cover: Adi
Nugraha, S.E

Diterbitkan pada Mei 2019
Oleh
Bhakti Banten Press

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil aalamiin segala puji kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala. Atas berkat pertolongan dan rahmatnya draft buku Abdul Fatah Hasan (1912-1948), Anggota BPUPKI asal Banten yang Dibuang Belanda di Laut Timor kami dapat diselesaikan dengan lancar.

Karya yang sederhana ini adalah hasil diskusi kami ketika menyusun naskah akademik perjuangan Brigjen KH. Syam'un 2014-2015. Ketika sedang mengelaborasi perjuangan KH Syam'un dalam lapangan pendidikan, kami menemukan beberapa arsip dan data lisan dari sejumlah informan yang kami wawancara, yang menurut kami relevan sebagai sumber dan data untuk merekonstruksi sosok Abdul Fatah Hasan.

Risalah Sidang BPUPKI yang diterbitkan oleh sekretariat DPR tahun 2000 merupakan salah satu sumber penting untuk memperkaya narasi terutama ketika menjelaskan kiprahnya pada pembentukan dasar, falsafah, UU dan perjalanan bangsa ini dalam sidang-sidang BPUPKI yang diikutinya. Penjelasan tentang wafatnya, hanya kami dapatkan dari cerita lisan anak keturunannya. Sumber primer yang relevan belum kami dapatkan. Oleh karena itu dalam edisi revisi nanti kami akan berupaya mengumpulkan sumber-sumber primer, arsip, foto, maupun

Koran yang memberitakan masa akhir hayatnya. Selain diabadikan dalam nama salah satu jalan utama di ibukota Provinsi Banten, tidak ada dokumentasi tertulis yang merekam perjuangan tokoh pemuda patriotic ini. Oleh karena itu, publikasi karya sederhana ini diharapkan berguna terutama dalam memperkaya kisah dan kiprah perjuangan seorang kusuma bangsa.

Berbagai pihak telah membantu kami dalam penyusunan draft buku ini. Keluarga Besar Abdul Fatah Hasan dan Syadli Hasan telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan data dan informasi yang berguna dalam penyusunan karya sederhana ini. Dinas Sosial Provinsi Banten mensponsori sebagian kegiatan penulisan karya ini. Farhan al-Fuadi telah mendedikasikan banyak waktu untuk penulisan draft buku ini. Adi Nugraha telah bekerja keras untuk menyajikan karya ini dalam format buku yang tertata rapih. Namun demikian, mereka tidak bertanggung jawab dengan segala hal yang menyangkut isi dan substansi tulisan dari draft karya ini yang merupakan tanggung jawab kami selaku tim penulis.

Pandeglang, 25 April 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ~1
A. Al-Khairiyah, Pusat Kaderisasi Patriot Bangsa ~ 1
B. Fokus Kajian ~ 8
C. Sumber Kepustakaan ~ 9
D. Sistematika Pembahasan ~ 11

BAB II AL-KHAIRIYAH DAN LAHIRNYA ULAMA PEJUANG ~ 14
A. Banten Memasuki Era Baru ~ 14
B. Sekolah Ala Belanda dan Perubahan Sosial-Budaya ~ 36
C. Pesantren Citangkil: Transformasi Pendidikan Islam Tradisional di Banten ~ 44
D. Heroisme Pendidikan al-Khairiyah ~ 50
E. Al-Khairiyah dan Kemunculan Kelompok Intelektual Baru ~ 56

BAB III K.H. ABDUL FATAH HASAN, SANTRI AL KHAIRIYAH YANG BELAJAR KE AL AZHAR (1924-1939) ~ 77
A. K.H. Abdul Fatah Hasan, Santri Dari Beji (1912-1924) ~ 77
B. Orang Banten Belajar ke Luar Negeri ~ 80
C. Kaderisasi Santri al-Khairiyah ke al-Azhar Kairo (1924-1933) ~ 88
D. Mengenal Dunia Pergerakan Nasional di Mesir (1933-1939) ~ 91

E. Kembali ke Banten, Mengabdikan Ilmu di al-Khairiyah ~ 100

BAB IV KIPRAH DI PARLEMEN SEBAGAI ANGGOTA BPUPKI/PPKI ~ 102

A. Berjuang di Parlemen ~ 102

B. Teguh Mempertahankan Nasionalisme ~ 107

DAFTAR PUSTAKA ~ 108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Al-Khairiyah, Pusat Kaderisasi Patriot Bangsa

Tahun 1920-1945 adalah masa-masa yang paling menentukan bagi titik tolak perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan masyarakat yang berdaulat. Dalam tahun-tahun itu bangsa Indonesia secara umum memiliki kesadaran baru tentang konsep dan arti sebuah bangsa yang berdaulat. Kondisi ini tidak menafikan akibat dari modernisasi struktur sosial dan budaya yang dilancarkan oleh pemerintah Belanda. Pada saat yang sama, kesadaran baru pun tengah tumbuh di negeri Belanda, suatu usaha mereparasi pendekatan politis terhadap negeri-negeri jajahan. Kerajaan Belanda atas desakan dewan negeri-negeri jajahan, menerapkan sistem politik etis, yang disebut oleh para ahli sejarah, politik timbal balik. Salah satu buah dari politik etis adalah pemerataan pendidikan modern yang diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia secara merata. Dan sebagai respon terhadap arus ini, banyak para intelektual pribumi yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan lokal yang modern. Tidak saja sebagai

usaha menjawab tantangan Barat, dan perlawanan terhadap kolonialisasi melalui pendidikan, usaha-usaha mereka juga menjadi solusi bagi kelompok masyarakat yang tidak tersentuh kebijakan-kebijakan kolonial.

Al Khairiyah termasuk salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional di Banten yang berhasil memenuhi harapan masyarakat lokal menghadapi arus modernisasi yang dimotori Pemerintah Belanda. Pesantren yang didirikan tahun 1916 oleh seorang kiayi yang memiliki hubungan darah dengan Ki Wasid, K.H. Syam"un, mengalami transformasi menjadi madrasah yang modern. K.H. Syam"un tergolong ulama progresif di Banten. Memiliki pandangan yang terbuka, melihat dengan kaca mata yang berimbang dalam mensikapi arus modernisasi atau lebih tepatnya pembaratan melalui sekolah-sekolah Belanda. Al-Khairiyah harus dimodernisasi secara fundamental dengan tetap memelihara akar keislaman yang kuat. Pengalaman batin dan intelektual yang ia dapatkan selama aktif di Arab dan Mesir sebagai pelajar atau seorang haji, ikut mengkuatkan inspirasinya mewujudkan sistem pendidikan Islam yang modern dan tradisional sekaligus. Usaha yang sudah ia mulai di tahun 1925 atau 1926 (Mufti Ali, dkk, 2018: 14-18).

Usaha modernisasi pesantren Citangkil yang dilakukan K.H. Syam"un berhasil mendorong lahirnya kelompok intelektual muslim lokal yang baru. K.H. Syam"un mendidikan santri-santrinya memiliki militansi yang kuat dengan semangat patriotisme. Militansi para alumni al Khairiyah diperkuat melalui pengalaman langsung mereka berinteraksi dengan zamannya. Al-Khairiyah mengkader alumni-alumni terbaiknya dengan mengirim mereka ke al-Azhar Kairo Mesir. Dari tahun 1933 sampai tahun 1981 al-Khairiyah telah mengirim alumni-alumni terbaiknya studi ke Mesir dan beberapa negara Arab lainnya setelah memasuki tahun 1981. Mereka yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di Mesir itu kembali ke al-Khairiyah dan berkiprah sebagai guru yang membawa banyak perubahan. Tak heran jika kemudian al-Khairiyah tumbuh sebagai al-Azharnya Banten. Untuk pertama kalinya al Khairiyah mengutus dua alumni terbaiknya Abdul Fatah Hasan dan Muhamad Sadzli Hasan. Untuk kali pertama ini K.H. Syam"un langsung yang mengantarkan keduanya ke al Azhar (Mufti Ali, dkk., 2018: 118).

Periode kedua al Khairiyah mengirimkan alumni terbaiknya dengan jumlah yang lebih banyak. Pada tahun 1956 al Khairiyah mengirim empat orang alumninya setelah sukses mengkader dua orang alumni terbaiknya untuk pertama

kalinya di tahun 1933. Mereka adalah Rahmatullah Sya"un, Qurtubi Janah, Abdul Wahhab Afif, dan Sufri Muslim. Pada tahun 1960 al Khairiyah kembali mengirimkan alumni untuk belajar di al Azhar, mereka yang dikirim pada tahun ini adalah Fathullah Syam"un, Syamhudi Aduh, Muhamad Saju Razak. Empat belas tahun berikutnya dua orang alumninya diutus untuk belajar ke al Azhar. Mereka adalah Rahimi Misja dan Mahfud Adra`i atas kerja sama dengan Akademi Ilmu al Quran. Memasuki tahun 1981, alumni al Khairiyah tidak lagi berorientasi ke al Azhar Mesir, Udi Mufrodi, seorang alumni terbaik lebih memilih Iraq sebagai tujuan belajarnya (Mufti Ali, dkk, 2018: 118). Sebagian yang lain tetap, memilih al Azhar sebagai tempat belajar yang dituju untuk mematangkan ilmunya sampai tahun 1982.

Para alumni al Khairiyah yang menuntut ilmu ke Mesir dan beberapa negara di Timur Tengah mengalami persentuhan langsung atau tidak langsung – meski tidak semua – dengan berbagai pergerakan dan wacana pan-Islamisme. Antara tahun 1920 sampai 1945 para pelajar Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Pergulatan pemikiran dan batin mereka yang dibawa dari tanah airnya, tanah jajahan Belanda, bergumul secara intim dengan semangat nasionalisme yang di Mesir pun sedang mengalami puncak kematangan. Tidak jarang para

pelajar asal Indonesia terlibat di dalam pergerakan pelajar yang progresif, baik mereka yang terhimpun di dalam perkumpulan pelajar asal Indonesia atau perhimpunan asli Mesir. Dua organisasi yang perlu disebut di sini yang memiliki hubungan tidak langsung dengan heroisme para pelajar al Khairiyah, Ikhwan al Muslimin yang didirikan oleh Hassan al-Banna, seorang intelektual muslim asal Mesir dan Jam"iyat al Khairiyat yang didirikan oleh pelajar Indonesia dan Melayu. Seperti disinyalir di lingkungan al Khairiyah sendiri ada dugaan pengambilan nama madrasah yang didirikan oleh K.H. Syam"un, terinspirasi oleh pergerakan Jam"iyat al-Khairiyat ii (Mufti Ali, dkk, 2015: 49).

Dua tokoh alumni al-Khairiyah yang pertama kali diberangkatkan ke Mesir, Abdul Fatah Hasan dan Muhamad Syadzli Hasan, patut disebut sebagai contoh aktivisme para alumni al Khairiyah yang progresif. Keduanya disebut-sebut telah bersentuhan langsung dengan pergerakan Ikhwan al Muslimin di Mesir. Abdul Fatah Hasan memiliki keterlibatan yang cukup dalam di organisasi ini. Selama kurun kurang lebih antara tahun 1933 sampai 1939 ia aktif menulis di Koran Ikhwan al Muslimin dan menjadi narasumber di radio-radio Mesir yang berafiliasi ke Ikhwan al Muslimin (Syibli Sarjaya, dkk, 2014: 42).

Semangat heroisme dengan pemikiran yang progresif dibawa pulang oleh para akumni al Khairiyah yang telah menamatkan studinya di Timur Tengah. Mereka telah berhasil menghidupkan dan memperkuat peran madrasah al-Khairiyah di kancah sosial-politik. Mereka bergerak senafas dengan semangat juang sang guru, K.H. Syam"un dalam ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejak berdirinya PETA oleh Jepang sampai BKR/TKR di masa kemeredekaan, seruan K.H. Syam"un untuk ikut berperan memperjuangkan kemerdekaan diikuti dengan mudah oleh para muridnya. Mereka adalah murid-murid yang telah mengenyam pendidikan di Timur Tengah, K.H. Abdul Fatah Hasan, Muhamad Syadzli Hasan, Ali Jaya, Qurtubi Jannah, Sibromalisi, Rahmatullah Syam"un, Rahmatullah Sidiq, keduanya aktif di Barisan Tentara Pelajar atau TRIP (Mufti Ali dan Rahayu Permana, 2018: 11).

Abdul Fatah Hasan adalah muri K.H. Syam"un yang kelihatannya memiliki talenta dan kharismatik yang dekat dengan gurunya. Ia berhasil menembus batas geopolitics peran sosialnya. Ia tidak saja menjadi tokoh Banten yang berpengaruh, tetapi dengan kecakapan intelektual dan pengalamannya di dunia pergerakannya telah memberi peluang kepadanya untuk aktif di BPUPKI. Ia termasuk anggota

BPUPKI yang dipilih mewakili masyarakat Banten. Kemudian dipercaya menjadi wakil bupati mendampingi gurunya sendiri saat menjabat bupati Serang (Syibli Sarjaya, dkk, 2014: 46-47). Tidak salah jika kemudian tentara Belanda dalam agresi militer keduanya memilihnya sebagai target yang harus dilenyapkan.

Menghadapi situasi krisis kedaulatan di Jawa Barat setelah Belanda berhasil menduduki Jakarta dan pemerintah Indonesia mundur ke Jogjakarta. Pemerintah pusat menyerukan perang grilya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia yang terancam di bawah tekanan Belanda. Tokoh-tokoh pergerakan di Banten pun bergrilya di pedalaman. K.H. Syam"un bersama murid-muridnya bergrilya dari gunung ke gunung. Hingga akhirnya ia wafat di daerah dekat Mancak. Sedangkan beberapa tokoh lainnya yang masih berhasil meloloskan diri masih tetap bergrilya di gunung-gunung. Gunung Merdeka, Gunung Gede, Gunung Batur adalah rute grilya yang dilalui oleh Abdul Fatah Hasan. Pada tahun 1949 akhirnya Abdul Fatah Hasan bersama saudaranya Muhamad Syadzli Hasan dan Eri Sudewo, serta Agustik tertangkap Belanda. Mereka dibawa ke Cilegon, kecuali Abdul Fatah Hasan yang dibawa ke Serang. Rupanya tentara Belanda telah mengekskusinya sebelum sampai di Serang (Syibli Sarjaya, dkk,

2014: 53). Kematiannya pun sampai saat ini masih dianggap misteri.

Mengingat besarnya peran Abdul Fatah Hasan sebagai seorang kiayi alumni al Khairiyah yang diakhiri dengan kematiannya yang misterius, kajian ini menjadi penting untuk merekam jejak patriotismenya. Oleh karena itu, kajian ini akan mengambil ketokohan Abdul Fatah Hasan sebagai tokoh kiayi Banten yang memiliki kontribusi besar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

B. Fokus Kajian

Kajian ini akan membatasi pembahasannya seputar riwayat hidup dan kiprah K.H. Abdul Fatah Hasan di bidang politik untuk menggambarkan peran dan kontribusinya sebagai seorang alumni al Khairiyah dan tokoh Banten dalam perjuangan bangsa. Untuk lebih menegaskan dan mempersempit ruang bahasan kajian ini, kami akan membatasinya pada empat masalah pokok:

1. Apa yang melatarbelakangi heroisme K.H. Abdul Fatah Hasan?
2. Bagaimana riwayat hidupnya?
3. Seberapa jauh kiprahnya di pemerintahan?
4. Bagaimana riwayat akhir kematiannya?

Dengan rancangan sub-fokus ini diharapkan kajian ini bisa memberikan gambaran utuh biografi perjuangan K.H. Abdul Fatah Hasan.

C. Sumber Kepustakaan

Sejauh ini belum banyak buku yang ditulis untuk memberikan gambaran utuh biografi perjuangan K.H. Abdul Fatah Hasan. Sementara waktu narasi tentang ketokohannya masih bercampur di dalam tulisan-tulisan yang mengangkat biografi K.H. Muhamad Syadzli Hasan. Kedua tokoh ini menjadi saudara "kembar" sebuaian dan seperjuangan yang tak bisa dipisahkan.

Kami berhutang budi kepada banyak penulis yang sudah memberikan jalan masuk kepada kami untuk memetakan riwayat hidup dan kiprah perjuangannya. Beberapa buku sudah mengulas secara singkat, meski belum ditulis secara mandiri, biografi K.H. Abdul Fatah Hasan, diantara yang patut kami sebutkan disini adalah Biografi Ulama Banten Seri 1 (Dinas Budpar Prov. Banten dan Lab. Bantenologi, 2014), Prof. K.H. M. Syadzli Hasan; Ulama, Pejuang, Negarawan, Akademisi, dan Pemikir; Sepenggal Biografi Dalam Lintasan Sejarah Indonesia, (Baiturahman Publisher, 2014), Biografi K.H. Syam"un (Dinas Budpar dan Lab. Bantenologi, 2015),

Perguruan al Khairiyah: Jejak Akademis Brigjen K.H. Syam"un Pahlawan Nasional Dari Banten (Bhakti Banten Press, 2018).

Karya-karya yang kami sebutkan tidak memuat biografi K.H. Abdul Fatah Hasan. Kecuali saja semuanya telah menjadikan catatan biografinya sebagai sub bagian saja dari narasi di dalamnya. Seharusnya biografinya mendapat ruang di dalam dua karya penting mengenai al Khairiyah: Biografi K.H. Syam"un dan Perguruan al Khairiyah Jejak Akademis Brigjen Syam"un. Pada buku yang terakhir kami sendiri selaku penulis buku tersebut bukan karena sengaja tidak memasukan biografinya ke dalam bab aktivis alumni al Khairiyah. Kami memiliki waktu yang sempit dengan sumber data yang masih minim saat buku tersebut ditulis. Untuk memenuhi keharusan itu kami pun memasukannya ke dalam sub bagian dari narasi K.H. Muhamad Syadzli Hasan sebagaimana kami temukan di berbagai karya tulis yang relevan.

Sumber-sumber sezaman digunakan sejauh memiliki kontek yang dibutuhkan. Utamanya untuk memahami dan menjelaskan dinamika zaman. Termasuk dalam hal ini adalah surat kabar dan arsip yang menyimpan data yang relevan dengan kajian ini.

Semua sumber pendukung disortir berdasarkan kedekatan materi bahasan yang dimiliki. Mengingat ruang

hidup tokoh K.H. Abdul Fatah Hasan memiliki ruang gerak yang luas, ruang hidupnya meliputi Banten, Indonesia, dan Mesir. Maka semua sumber yang bersentuhan dengan tiga subjek tersebut akan digunakan sejauh memiliki relevansi yang kuat dengan kajian ini. Semua data yang diinventarisir dari sumber-sumber ini akan digunakan sebagai alat baca untuk memahami spirit zaman yang melingkupi dan ikut membentuk perkembangan hidup tokoh dalam buku ini.

D. Sistematika Penulisan

Secara garis besar buku ini akan memuat enam bab; satu bab pendahuluan dan satu bab penutup, sisanya bab ini atau kajian utama. Untuk menjelaskan secara rinci sekaligus mengilustrasikan isi dari buku, berikut ini akan kami jelaskan secara singkat.

Bab kesatu memuat bab pendahuluan yang akan memuat desain konseptual dari buku. Kajian di dalam buku ini, sebagai buku dengan tema kepahlawanan, maka pijakan dasarnya haruslah menempatkan al-Khairiyah sebagai pusat kaderisasi patriot bangsa; mengingat pendirinya telah disahkan sebagai pahlawan nasional dan tidak sedikit para alumninya yang terlibat aktif bersamanya memperjuangkan kemerdekaan RI. Fakta ini dipersempit dan dirumuskan ke dalam fokus

kajian yang telah memilih tokoh K.H. Abdul Fatah Hasan salah satu alumni al-Khairiyah terbaik yang duduk sebagai anggota BPUPKI RI yang kematiannya diakui diselimuti misteri yang belum terpecahkan. Untuk mengungkap data dalam kajian ini, maka kami sudah merumuskan dan memilih sumber kajian yang sedapat mungkin mampu menjelaskan profil ketokohannya di Banten dan di Indonesia, sumber-sumber yang kami pilih memang bukanlah sumber primer utama, namun pun demikian kami tetap selektif untuk memilih sumber-sumber sekunder, arsip juga memang kami gunakan untuk memahami lebih dekat ketokohannya. Kemudian tahapan-tahapan kajiannya kami gambarkan melalui rencara isi buku ini.

Bab kedua membicarakan kondisi sosial-politik dan budaya masyarakat Banten dalam kurus 1920-1930an dan peran sentral al-Khairiyah dalam upaya mencetak generasi pembangun bangsa. Kajiannya akan diawali dengan sub bahasan seputar perubahan strategis pemerintahan Belanda dan nilai positifnya bagi dinamika sosial-budaya masyarakat Banten. Sekolah Belanda adalah contoh kasus yang kami angkat di dalam bab ini yang ikut mendorong lahirnya kaum intelektual baru dan munculnya kelas sosial menengah yang baru. Kemudian kajiannya dikerucutkan untuk meninjau

kedudukan al-Khairiyah yang dibangun dari Pesantren Citangkil sebagai cikal bakalnya yang kemudian ditransformasikan menjadi madrasah yang modern dengan ajaran heroisme yang kuat yang dicontohkan langsung oleh K.H. Syam"un. Secara garis besar kami melihat bahwa al-Khairiyah telah berhasil melahirkan kelompok intelektual baru yang mampu berperan aktif di kancah nasional.

BAB II
AL-KHAIRIYAH DAN LAHIRNYA ULAMA PEJUANG

A. Banten Memasuki Era Baru

Setelah memasuki tahun 1900 kerajaan Belanda mengeluarkan perubahan kebijakan politik untuk Hindia Belanda. Pemerintah Belanda mulai memberlakukan teori politik etis untuk Hindia Belanda sejak tahun 1901 (Muljana, 2008: 11). Dengan teori ini, pemerintah kolonial harus ikut serta membangun negara jajahannya. Pemerintah harus mulai memikirkan masa depan rakyat Hindia Belanda, kesejahteraannya dan pendidikannya.

Mr. Conrad Th. Van Deventer adalah seorang anggota parlemen di Kerajaan Belanda yang mendorong keluarnya kebijakan plotiki etis. Gagasannya dituangkan di dalam artikel berjudul *"Een Eereschuld"* (Hutang Kehormatan) yang terbit di majalah *De Gids* tahun 1899. Di dalam artikel ini, van Deventer menegaskan bahwa kerajaan Belanda harus mengembalikan uang rakyat Indonesia sebesar 187 juta Gulden dari hasil tanam paksa yang pernah diberlakukan di Hindia Belanda (Vlekke, 2003: 327). Usulan dana bantuan sebesar

187 juta gulden tersebut diambil dari keuntungan kerajaan Belanda yang didapat dari tanah Hindia Belanda.

Setelah keluarnya usulan van Deventer dan diolah secara matang oleh parlemen kerajaan Belanda, Ratu Wilhelmina (1890-1948) mengeluarkan putusan melakukan penelitian terhadap kesejahteraan di Jawa (Ricklefs, 2011: 228). Untuk merealisasikan kebijakan politik etis, Ratu Wilhelmina mengangkat Alexander W.F. Idenburg menjadi menteri urusan negara-negara jajahan yang menjabat dari tahun 1902 sampai 1919. Kebijakan politik etis direalisasikan oleh Idenburg melalui tiga program kesejahteraan: *edicate, emigratie,* dan *irrigatie* (pendidikan, perpindahan penduduk dan pengairan) (Ricklefs, 2011: 228). Sejak bergulirnya kebijakan politik ekonomi kerajaan Belanda untuk Hindia Belanda, bangsa Indonesia mulai mendapat angin segar dan menemukan harapan baru secara berangsur.

J. Stroomberg di dalam *Handbook Hindia Belanda* yang diterbitkan Divisi Perdagangan tahun 1930 memberi gambaran singkat tentang situasi politik hubungan antara pemerintah pusat di Kerajaan Belanda dengan negeri jajahan Hindia Belanda. Politik etis menurutnya berpangkal pada kebijakan pengelolaan keuangan di bawah kontrol *volkstraad*. Pemerintah Belanda harus menarik garis tegas antara keuangan dan negara,

dan keseimbangan tepat tidak perlu lagi ditambahkan ke budget Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kini memiliki bendahara sendiri. Oleh karenanya pemerintah bisa memberi perhatian penuh pada problem-problem kemakmuran wilayahnya. Dana besar sudah dihabiskan untuk kepentingan pemulihan sarana perekonomian (Pelabuhan, jalan kereta api dan sebagainya) dan untuk mendorong perkembangan material dan spiritual penduduk pribumi seperti pendidikan, kesehatan umum, advis kredit pribumi dan sebagainya (J. Stroomberg, 2018: 51-52).

Satu-satunya dasar pemerintahan yang mengatur seluruh perubahan ini merujuk kepada undang-undang pemerintahan Hindia Belanda tahun 1925. Menurut Stroomberg undang-undang 1925 bersama-sama undang-undang 1922 memberi langkah sangat penting di jalur penciptaan pemerintah swapraja di Hindia Belanda. Diantara angin segar bagi kaum pribumi yang bisa didapat dari kedua undang-undang tersebut, utamanya undang-undang 1925 adalah perubahan status *volkstraad*, semua hanya menjadi badan penasihat bagi Gubernur Jenderal, khususnya untuk keperluan budgeting, kini ia menjadi badan legislative yang menerima kuasa sebagai perumus undang-undang dan memberi persetujuan atas seluruh peraturan Gubernur Jenderal. Di dalam undang-

undang 1925 keanggotaan badan legislatif memberi ruang kepada pribumi untuk duduk di dalam lembaga ini dengan porsi yang cukup adil 25 kursi untuk pribumi dan mengalami peningkatan di tahun 1931, menjadi 30 kursi (J. Stroomberg, 2018: 100-101).

Bahkan melalui amandemen Undang-undang Hindia Belanda tahun 1928, pribumi diberikan kursi untuk duduk di Dewan Gubernur Jenderal, suatu lembaga yang berwewenang memberikan nasihat kepada Gubernur Jenderal yang di dalam lembaga Dewan Gubernur Jenderal menduduki jabatan presiden, menyangkut perundangan (J. Stroomberg, 2018: 103). Dalam kasus tertentu, Gubernur Jenderal harus mendapat persetujuan Dewan ini, khususnya untuk perkara membuang dan mengasingkan, dan pengabulan dispensasi dari regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan (J. Stroomberg, 2018: 105).

Di tahun-tahun ini juga Belanda melakukan reorganisasi terhadap administrasi daerah. Banyak batas-batas wilayah lama mengalami perubahan. Beberapa daerah di Hindia Belanda ada yang masih tetap diberikan hak kuasa dengan pendekatan swapraja. Yang dimaksud kebijakan swapraja ini adalah pemerintah menjamin keberlangsungan pemerintahan lokal yang telah tumbuh secara alami dan melestarikannya dalam

bentuk yang baru, menerapkan sistem administrasi Belanda. Contoh di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kerajaan di Jawa diubah menjadi provinsi-provinsi baru tanpa dewan provinsi dari tahun 1929-1930 (J. Stroomberg, 2018: 114). Sementara di Jawa Barat dilakukan fusi besar-besaran. Keresidenan-keresidenan lama meliputi Banten, Batavia, Priangan dan Cirebon digabungkan menjadi satu provinsi di bawah seorang gubernur dengan Batavia sebagai ibu kotanya (J. Stroomberg, 2018: 111).

Berasarkan undang-undang 1922 Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat dan dipecah dua afdeling, dua controle-afdeling, tiga kabupaten, lima belas distrik dan 1297 desa. Serang dijadikan ibu kota untuk keresienan Banten (Nina Lubis, dkk., 2014: 230). Ketika undang-undang ini diberlakukan, yang menjadi Residen Banten adalah J.C. Bedding. Kemudian Banten mengalami pergantian residen secara berurut dari J.C. Bedding, lalu digantikan oleh De Vries, F.G. Putman Cranner, J.C. De Kanter, A.M. Fander Flast, J.R. De Buesekom, Mr. W.H. Court yang menjabat antara tahun 1941-1942. Banten termasuk daerah yang tidak diberikan hak menjalankan pemerintahan tradisional. Berbeda dengan Jawa Tengah yang mendapat kebijakan swapraja. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat sudah menjadikan Banten sebagai

daerah yang tidak begitu penting. Pemerintah pusat tidak lagi menimbang siapa yang harus menjadi residen di Banten, yang penting bisa memimpin (A. Djajadiningrat, 1996: 338).

Para kepala daerah pribumi memiliki kedudukan yang tidak beruntung. Biar pun undang-undang mengatur, bahwa mereka mendapat hak sederajat dengan dihapuskannya sistem perwalian, sehingga para kepala mendapatkan wewenang penuh atas wilayahnya. Pada praktiknya tetap saja kekuasaan masih ada di tangan para ambtenaar Eropa sepenuhnya. Mereka hanya dijadikan alat kekuasaan, agar mereka tatap dapat menguasai dan memerintah pribumi dengan resiko perlawanan yang sedikit tipis. Apalagi setelah kebijakan politik pemerintah pusat menetapkan kedudukan bupati tidak harus dari keturunan para raja, siapa saja bisa memimpin asal memiliki pendidikan layak dan kecakapan memimpin dengan pengalaman kerja di bestuur, yang paling penting dapat bekerjasama yang menguntungkan pemerintah Belanda (A. Djajadiningrat, 1996: 353-354).

Untuk pertama kalinya Dewan Daerah didirikan di Banten pada tahun 1907. Setelah berdirinya Dewan Daerah dan karenanya Banten menjadi sebuah keresidenan yang otonom dengan sifat demokratis. Kini para orang-orang pribumi di dalam pemerintahan dapat duduk sama rendah dan

berdiri sama tinggi dengan pejabat-pejabat Eropa. Sayangnya sistem ini menghadapi batu sandungan yang berat, karena secara mentalitas, kaum pribumi masih belum siap untuk berhadapan langsung secara had to had dengan orang-orang Eropa. Seperti digambarkan Ahmad Djajadiningrat di atas, Banten dipandang oleh pemerintah pusat sudah menjadi daerah yang tidak bergitu penting. Oleh karena itu, hampir tidak ada usaha perbaikan kepada ambtenaar pribumi, seakan-akan kondisi ini sengaja dibiarkan. Situasi ini misalnya dilukiskan oleh Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat di dalam memoarnya (1996), orang-orang Banten justru menghadapi masalah taraf wawasan oleh sebab tingkat pendidikan yang tidak sepadan dengan bangsa Eropa. Tak jarang, misalnya ia gambarkan, para ambtenaar pribumi tidak serius mengikuti rapat-rapat di Dewan Daerah. Bahkan pada tahun-tahun itu, di Banten anggota pribumi yang bisa berbahasa Belanda hanya P.A. Ahmad Djajadiningrat (A. Djajadiningrat, 1996: 314-315).

Belanda sekali lagi menghadapi masalah teknis dalam usaha menerapkan undang-undang otonomi. Kebijakan etis kerajaan Belanda atas Hindia Belanda yang dibangun di atas prinsip Indonesia harus diperintah bukan untuk Belanda, tapi untuk Indonesia sendiri, memberikan keharusan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk meningkatkan taraf

pendidikan pribumi sebaik mungkin. Usulan ini sudah diajukan sejak tahun 1845 oleh Baud. Baru pada tahun 1879 pendidikan untuk para calon kepala *Hoofdenschool* didirikan untuk pertama kalinya. Setelah masa itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan para ambtenaar S. De Geraf mengusulkan perbaikan pendidikan agar hasilnya lebih baik. Untuk merealisasikan usulan ini diterbitkanlah *Besluit* 28 Juli 1914 No. 42 yang membentuk komisi penasihat untuk pemerintah dalam usaha meningkatkan pendidikan para ambtenaar. Dalam suatu rapat komisi ini, Ahmad Djajadiningrat, ketika menjabat Bupati Serang, pernah mengusulkan agar para ambtenar pribumi seharusnya mendapatkan pendidikan setingkat akademi atau setidaknya setaraf dengan ambtenaar Eropa. Usulan ini baru terealisasi 16 tahun kemudian melalui rapat Ikatan Bupati yang secara khusus membincangkan masalah ini (A. Djajadiningrat, 1996: 355).

Tentunya di samping membangun berbagai sarana pendukung untuk peningkatan sumber daya ekonomi, khususnya, pertanian dan transportasi. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menurunkan berbagai usaha pembangunan di berbagai bidang, kereta api sampai transportasi udara untuk publik. Pemerintah juga mendorong perbaikan di bidang pertanian dan berbagai usaha di bidang ekonomi-industri.

Menurut laporan F.G. Putman Craemer, 24 Februari 1931 Distrik Cilegon termasuk daerah yang cukup kering. Penduduk memanfaatkan tanah yang kering untuk ragam kegiatan pertanian dan perkebunan, sebagian difungsikan sebagai pekarangan, sawah gogo, kebun kelapa, kebun buah-buahan, dan kebun bawang merah. Kebiasaan ini berlaku tidak saja di Cilegon tapi juga di Keramatwatu dan Balagendong Kabupaten Serang (ANRI, 1980: XVIII).

Sistem sawah yang banyak digunakan penduduk Cilegon adalah sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan di distrik ini digarap secara teratur dan berbeda dengan daerah lain, karena daerah ini masa curah hujan pendek dan musim kemaraunya sangat awal. Mengikuti keadaan cuaca yang tidak stabil, penduduk distrik Cilegon mengembangkan tiga macam penggarapan sawah tadah hujan, yaitu: *a) Cara sawah kletek*, menurut cara ini pembibitan dilakukan dipesemaian kering pada bulan Oktober. Setelah hujan turun dan tanah berubah menjadi Lumpur, bibit yang sudah besar segera dipindahkan ke sawah pada bulan Desember-Januari. *b) Cara sebar sawah*, menurut cara ini sawah dibagi menjadi 2 á 3 petak. Pada bulan Oktober salah satu petak itu disebari benih seperti pada sawah gogo. Setelah tiba musim hujan dan tanah sudah mulai basah bibit yang sudah tumbuh di petak yang pertama itu sebagian

dipindahkan ke petak-petak yang lain. *c) Cara sawah pancar,* sawah mula-mula digarap dan ditanami seperti sawah gogo. Setelah hujan turun dan tanah menjadi Lumpur tanaman padi yang sudah tumbuh diperihara seperti sawah basah. Kalau perlu tanaman yang sudah tumbuh itu dikurangi atau disebar. Pada permulaan musim kemarau, ketika tanah pesawahan sebenarnya masih basah, petani biasanya tidak menanam padi. Setelah panen padi mereka lebih suka menanam palawija, seperti ubi, jagung, ketimun dan waluh (ANRI, 1980: XLIII).

Di beberapa desa tanah tegalan digunakan untuk menanam padi gogo. Demikian juga di daerah yang baru dibuka di guunung Salak dan gunung Gede. Karena lereng-lereng itu masih terlalu terjal, maka usaha bertani padi gogo belum menjadi matapencarian yang tetap. Selain ditanami padi gogo biasanya penduduk juga menanam pisang. Di Pulau Merak dan Bojonegara tanaman pisang menjadi kebun tersendiri. Sayangnya padi gogo di Distrik Cilegon tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan secara signifikan, setiap bau rata-rata menghasilkan 25, 4 pikul padi kering, karena itu Distrik Cilegon kekurangan pangan. Untuk memenuhi kekurangan pangan pemerintah mendatangkan bahan pangan dari Ciruas, Ciomas dan Pontang (ANRI, 1980: XLVI).

Penduduk Distrik Cilegon tidak menanam palawija di tanah tegalan, mereka lebih suka menjadikan tanah tegalan untuk kebun kelapa. Perkebunan kelapa banyak tersebar di Distrik Cilegon, Anyer dan Caringin baru berkembang setelah peristiwa meletusnya gunung Krakatau pada tahun 1883. Sementara pemerintah baru memberikan perhatian dan membantu memperluas perkembunan kelapa sesudah pemberontakan Cilegon 1888, ketika perdagangan kopra dan minyak kelapa sedang naik. Sebenarnya iklim di Cilegon terlalu kering untuk ditanami pohon kelapa. Hasil perkebunan kelapa di Cilegon baik secara kualitas dan kuantitas sangat bergantung pada keadaan iklim. Lereng gunung Gede dan pesisir pantai adalah lahan yang lebih baik untuk menanam kelapa di Cilegon (ANRI, 1980: XLVII). Menurut laporan De Kanter sampai tahun 1930-an di Cilegon hanya ada 2 perusahaan perkebunan dengan hak guna usaha penuh. Sementara di wilayah Lebak jumlahnya lebih besar dari pada yang bias ditemukan di wilayah Banten Utara yang tidak lebih dari 3 perusahaan perkebunan (ANRI, 1980: XCII).

Perkebunan kelapa bagi penduduk Cilegon menjadi ukuran kelas ekonomi, bagi penduduk yang menanam kelapa di pekarangan rumah dengan jumlah tidak lebih dari 30 batang masih belum disebut keluarga berkecukupan kecuali warga

yang telah memiliki 300 batang pohon kelapa yang dianggap keluarga berkecukupan. Pohon-pohon kelapa tidak pernah dijual lepas kecuali di jual-gadaikan dengan harga yang variatif, harga pohon kelapa yang ditanam di pekarangan rumah dengan produktifitas yang cukup tinggi relative lebih mahal dari kelapa tegalan, dengan kisaran harga f 5,- dan f 7,50,- pohon kelapa tegalan antara f 3,50 dan f 5. Untuk keperluan jual gadai Bank Kredit Rakyat Serang menyediakan kredit bagi pemilik kebun kelapa untuk keperluan menebus gadaian pohon kelapa, membeli kerbau untuk membajak tanah kebun, memperdagangkan hasil kebun kelapa dan membeli bibit kelapa dan membuka kebun baru (ANRI, 1980: XLVII).

Meski pemerintah setelah tahun 1888 memberi perhatian dan bantuan untuk perluasan perkebunan kelapa di Distrik Cilogon, setiap petani yang ingin membuka lahan perkebunan baru yang memanfaatkan lahan hutan dikenakan biaya sebesar f 15,- setiap bau untuk tanah hutan yang akan dibuka. Sedangkan untuk mengolah lahan dari mulai pembersihan sampai membuat pagar mencapai f 60,- ditambah biaya membuat lobang, untuk satu lobang mencapai 5 sen. Belum lagi ditambah biaya perawatan dengan upah membuat lobang per pohon kelapa 5 sen, upah angkut pupuk antara 2 ½ sen sampai 5 sen untuk setiap pohon. Sedangkan pupuk yang

dibutuhkan untuk satu pohon seharga 10 sen sampai 15 sen (ANRI, 1980: XLIX).

Perkebunan kelapa yang ada di Pulo Merak atau Kotabumi sejumlah 248 batang tidak terurus. Setelah diurus kembali, hasil kebunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan. Pada tahun 1926 hasilnya 120 buah dipanen 4 kali. Tahun 1927 menghasilkan 761 buah dipanen 6 kali. Tahun 1928 hasilnya 3.485 buah dipetik 10 kali. Di tahun 1929 4.245 buah dipanen 10 – 15 kali (ANRI, 1980: XLIX).

Harga jual buah kelapa bergantung pada tingkat kematangannya. Kelapa *kiring* (Kelapa yang sudah benar-benar matang, warna kulit sabutnya coklat tua) harganya f 32,- per 1.000 buah (f 0,032, per buah), kelapa gumading (atau koclak gerancang, warna kulit sabut hijau atau kuning dan kering) f 30,- per 1.000 buah (0,03 per buah), enom (koclak keplok, warna kulit sabutnya hijau atau kuning dan masih basah) dihargai f 25,- per 1.000 buah (0,025 per buah). Jika dibuat kopra masing-masing jenis kelapa itu menghasilkan kopra yang beragam juga. 1.000 kelapa kiring menghasilkan ± 3,2 pikul, kelapa gumading 1.000 buahnya menghasilkan ± 3 pikul dan kelapa enom 1.000 buahnya menghasilkan ± 2 ½ pikulan saja ((ANRI, 1980: L). Tentu harga jual untuk 1.000 buah kelapa

tidak sebanding dengan biaya memuka lahan yang menghabiskan biaya sampai f 60.

Perusahaan kopra dikuasai oleh etnis Cina. Mereka biasanya membeli seluruh hasil kopra di Distrik Cilegon lewat tengkulak. Yang digarap oleh tengkulak tidak saja usaha menjual kopra kepada perusahaan, tetapi juga menangani urusan pemetikan buah kelapa, mengupas sabut dan mengangkut ke perusahaan kopra. Kecuali pemilik-pemilik kebun kelapa yang rumahnya tidak jauh dari perusahaan kopra, biasanya mereka ini langsung menjual ke perusahaan tanpa perantara tengkulak. Kalau dupahkan, memetik dan mengangangkutnya ke desa untuk 100 buah seharga f 0,50,-. Upah mengangkut ke prusahaan sebesar f 0,25 per 100 buah. Satu gerobak mampu mengangkut kelapa kurang lebih 600 buah. Jika dihitung harga kelapa yang sudah dikupas sabutnya dan sampai ke kperusahaan mencapai ± f 3,85 per 100 buah. Tengkulak menjualnya kepada perusahaan f 4,- per 100 buah, jadi keuntungannya f 0,15 per 100 buah. Tiap 1.000 buah kelapa yang dibeli perusahaan, tengkulak biasanya menerima f 1,- sebagai premi. Biaya produksi kopra yang dkeluarkan oleh perusahaan untuk tiap pikulnya tidak kurang dari f 11,19 dengan biaya upah melepas daging kelapa dari batoknya mencapai f 0,06 per 100 buah (ANRI, 1980: L).

Pembangunan rel kereta api oleh *Staatsspoorwegen* di Indonesia pada umumnya memiliki fungsi yang kompleks, di samping untuk kepentingan ekonomi, juga berfungsi sosial-politik. Tujuan sosial dari pembangunan rel kereta api di antaranya untuk membuka akses wilayah-wilayah yang terisolasi di samping itu juga untuk kepentingan pasifikasi daerah yang banyak mengalami pergolakan seperti di Banten. Dengan dibangunnya rel kreta api dan penggunaannya semakin luas maka dihapuslah penggunaan kereta pos dengan tenaga kuda (Dinas Budpar Banten, 2011: 213-216; Juliadi, dkk, 2015: 165). Memasuki tahun 1896 pemerintah memperluas pembangunan jalur kereta api lintas Banten sepanjang 175 Km yang menghubungkan Batavia-Duri-Rangkasbitung-Cilegon-Anyer. Pada tanggal 13 Maret 1887 Stasiun Cilegon kelas III C mulai dibuka dengan peta jalan Serang-Anyer Kidul sepanjang 27 Km dengan stasiun transitnya di Cigading (Dinas Budpar Baniten, 2011: 214). Pembangunan jalan kereta api terus dikembangkan di Banten dari tahun 1896 sampai 1920 yang berhasil menembus Batavia-Rangkasbitung-Labuan; Batavia-Serang-Cilegon-Anyer; Batavia – Serang – Cilegon – Merak (PA. Djajadiningrat, 1996: 300).

Pembangunan jalur kereta api ini telah mendorong geliat kegiatan ekonomi dan pendidikan di Banten. Penjualan ikan

segar dari Anyer ke Batavia telah menjadi pemandangan setiap hari di gerbong-gerbong kereta api. Sebelum ada jalur kereta api, perjalanan Anyer-Batavia bisa menghabiskan waktu kurang dari 24 jam, kini para nelayan cukup membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam saja (Mufti Ali, dkk, 2016: 108).

Kini masyarakat Banten mengalami perubahan yang cepat. Kereta api telah benar-benar berfungsi sebagai media transmisi kebudayaan baru ke Banten. Masyarakat Banten mulai menyaksikan perubahan sosial dan budaya yang cepat. Melalui jalur kereta api masyarakat Banten mengalami interaksi budaya dengan „dunia luar" lebih intens. Banyak pegawai kereta api yang berasal dari Jawa Barat dan Priangan, dari mereka orang-orang Banten banyak meniru gaya hidup yang baru. Banyak anak-anak Banten yang menyelesaikan pendidikan tinggi di Batavia bahkan ada yang berhasil studi di Eropa. Baik lelaki atau perempuan sekarang memiliki lapangan kerja yang luas (Banten Bode, 27 November 1926). Keadaan seperti inilah yang dicita-citakan Residen Banten periode 1913-1915 C.W.A. van Rinsum „*van gunstigen invloed op den geest deer bevolking was voorzeker de spoorwegaanleg an uitbreiding van het onder wys*." Singkatnya, pengaruh yang paling mendalam terhadap penduduk adalah jalan kereta dan pendidikan (Mufti Ali, dkk, 2016: 105-106).

Di antara pengaruh dari pembangunan jalur rel kereta api yang mampu mencapai bagian pelosok negeri adalah tumbuhnya pergerakan rakyat Indonesia yang begitu cepat. Para aktivis pergerakan dapat dengan mudah keluar masuk daerah Banten dan mempropagandakan gagasan-gagasan yang menyegarkan sekaligus membangkitkan kesaradan nasionalisme. Dibantu dengan pemutakhiran teknologi percetakan. Surat-surat kabar, buku-buku, pamphlet, menyebar dengan luas ke berbagai wilayah. Bagi para bestuur ambtenaar, kehadiran organisasi-organisasi pergerakan yang begitu cepat menyedot keikutsertaan masyarakat yang melampuai lapisan menengah-atas, telah membuat repot kerja mereka, begitu Ahmad Djajadiningrat mengisahkan (A. Djajadiningrat, 1996: 329). Mereka harus melayani kepenting yang berlawanan; di satu pihak mereka adalah pekerja pemerintahan di pihak lain, mereka juga bagian dari bangsa yang terjajah. Bahkan tidak jarang para ambtenaar mendapat ancaman keamanan dan keselamatan dari para aktivis. Ahmad Djajadiningrat mengalami kondisi ini saat menjabat bupati Serang dan menjadi anggota Volksraad. Bagi para aktivis revolusi, mereka harus dilenyapkan, baik saat perjuangan revolusi menang atau kalah (A. Djajadiningrat, 1996: 329).

Memasuki tahun 1910-an perkumpulan-perkumpulan yang bersifat sosial, budaya dan politik mulai tumbuh di Banten. Ahmad Djajadiningrat menyebut ada dua perkumpulan yang mula-mula berhasil masuk ke Banten dan memiliki pengikut yang cukup signifikan. Yang pertama adalah *De Indische Partij* sebuah perkumpulan yang didirikan oleh Duwes Deker. Ahmad Djajadiningrat mengaku memiliki hubungan baik dengannya. Bahka ia salah satu tokoh pribumi yang mula-mula diajak diskusi oleh jusnalis kenamaan berdarah Eropa ini. Memang popularitasnya tidak begitu besar di bangdingkan Serikat Islam di Banten. Organisasinya memiliki masa di Rangkas Bitung. Kemudian menyusul di Serang, di kota kedua ini IP berhasil merekrut ratusan anggota dari kalangan pribumi dan orang-orang indo, orang Cina juga menaruh minat yang cukup kepada organisasi ini. Yang menarik dari organisasi ini adalah mereka berhasil menyama-ratakan orang Eropa dan pribumi dengan tanpa kecanggungan (A. Djajadiningrat, 1996: 343-344).

Serikat Islam masuk ke Banten dibawa dan dikenalkan oleh Raden Gunawan salah seorang pengurus pusat. Ahmad Djajadiningrat memiliki peran dalam memberikan arahan kepada Raden Gunawan bagaimana mengembangkan SI di Banten. Salah satu arahannya adalah mengangkat Hasan

Djajadiningrat sebagai ketua SI Serang. Dalam waktu singkat SI berhasil mengantongi ribuan pengikut di Banten. Dari mulai rakyat kecil sampai orang-orang elit dan guru agama, meski tidak semuanya setuju dengan SI. Awalnya memang Gubernemen memberikan persetujuan atas SI, bahkan Idenburg dan Dr. D.A. Rinkers seorang penasihat untuk urusan pribumi menjadi penasihat SI yang paling handal. Tetapi perkembangannya yang cepat dan revolusioner, membuat para pejabat Belanda khawatir. Bagi para ambtenaar di Banten sendiri, menghadapi dilemma, di satu pihak mereka harus melayani kepentingan bangsa, di pihak lain mereka adalah kepanjangan tangan Belanda. Di pelosok orang-orang SI membuat pusing para ambtenaar. Bahkan survey Ahmad Djajadiningrat membuktikan kepala-kepala distrik tidak senang dan tidak setuju adanya SI di Banten (A. Djajadiningrat, 1996: 349-350).

Belanda sendiri melalui para ambtenaarnya sudah berusaha melakukan kontrol dan rekayasa sosial untuk mengurai situasi yang memperlihatkan semakin kuatnya kesadaran nasional dan berbangsa di hati rakyat. Mereka mendirikan banyak perkumpulan yang orientasinya lebih bersifat menyalurkan aspirasi dengan jalan yang lebih psitif. Perkumpulan seperti “Piroekoen” dan “Sidamukti” adalah dua

contoh perkumpulan yang dibentuk oleh pemerintah. Piroekoen adalah perkumulan para ambtenaar pribumi yang misinya mendirikan perpustakaan. Di dalam perkumpulan ini para anggotanya diberi ruang berekspresi seperti pembacaan puisi (A. Djajadiningrat, 1996: 330). Tumenggung Aria Kartadiningrat mendirikan Sidamoekti (1924), suatu perkumpulan yang tujuannya untuk memberikan bantuan dan sokongan kepada penduduk pribumi untuk mensejahterakan hidup mereka (Farhan al Fuadi, 2017: 49). Perkumpulan-perkumpulan ini hanya menjadi kepanjangan tangan berbagai keinginan pemerintah Belanda, tidak memiliki daya dorong sekuat perkumpulan-perkumpulan kebangsaan yang untuk pertama kalinya ditampilkan oleh SI dan Indische Partij dan sejenisnya.

Ketika SI berubah menjadi kekuatan revolusioner atas arahan Idenburg, pengurus pusat menunda pembentukan kepengurusan pusat dan membiarkan cabang-cabang lokal bergerak otonom di bawah kontrol pengurus pusat. Di Banten putusan ini justru menjadi kesalahan fatal karena ketika meletusnya pemberontakan 1926 banyak orang-orang SI yang terlibat aktif dalam pemberontakan. Ruth McVey perlu didengar pendepatnya mengenai pemberontakan 1926 ini. Keterlibatan PKI sebenarnya lebih dominan di dalamnya dari

pada SI. SI sebenarnya tidak memainkan peran secara keorganisasian, karena kebijakan keanggotaan ganda yang diizinkan sebelumnya, para aktivisnya banyak yang masih aktif di PKI. Yang sebenarnya memiliki peran dan boleh saja yang bertanggung jawab sebenarnya VSTP (Asosiasi Buruh Kereta Api) Rangkas, Labuan dan Serang. Setelah pemberontakan berhasil digagalkan, di bawah tekanan pemerintah didapati ada 4000 orang yang memegang kartu merah dan itu artinya PKI (Ruth McVey, 2010: 527).

Setelah dipadamkannya gerakan revolusioner itu di Banten, pemerintah Belanda benar-benar melakukan pemantauan ketat dalam rangka usaha pemulihan di seluruh wilayah Banten. Sampai akhir 1927 usaha Belanda melakukan pembersihan terus berlanjut. Bupati Pandeglang R.A. A. Kartadiningrat dipecat dari jabatannya sebagai Bupati karena perbedaan sikapnya dengan Residen Banten Putman Cramer terhadap pergerakan 1926. Tidak hanya itu, dengan bahasa yang lebih halus ia diminta meninggalkan Pandeglang dan pergi ke Bogor, yang sebenarnya diasingkan, sebagaimana dialami oleh Syekh Asnawi Caringin (Mufti Ali, 2017: 98-105).

Tragedi 1926 yang paling dahsyat terjadi di Labuan dan Menes. Di beberapa daerah lainnya seperti Serang, polisi berhasil melumpuhkan gerakan sebelum meletus besar.

Peristiwa ini memberi pengaruh yang signifikan kepada kehidupan sosial masyarakat Banten sesudahnya. Belanda melakukan pengawasan ketat kepada beberapa lembaga pendidikan Islam yang tokh-tokohnya banyak terlibat, Matlaul Anwar adalah contoh yang jelas (Farhan al Fuadi, 2017: 126; Mufti Ali, dkk, 2018: 111). Bahkan Putman Cranner yang menjabat residen Banten antara 1925-1931 memberi laporan di dalam naskah serah terima jabatannya, bahwa setelah peristiwa itu memperlemah pengaruh kiayi di luar lingkaran pemerintah terhadap masyarakat sampai 1931 (Sartono Kartodirdjo [ed], 1980: XXIII).

Banyak tokoh pergerakan yang aktif di SI dan PKI sekaligus diasingkan ke Boven Digul. Tokoh terpenting di masa itu yang memainkan peran besar dalam mobilisasi massa yang patut disebut adalah Achmad Chatib. Ia ditangkap polisi militer Belanda pada tanggal 23 Oktober 1926 dan ikut diasingkan Boven Digul (Mufti Ali, 2017: 70). Banyak aktivis eks. Digulis yang kembali ke daerahnya masing-masing telah ikut andil dalam mengisi ragam catatan sejarah menjelang revolusi hingga pasca kemerdekaan. Achmad Chatib, tentunya dengan banyak tokoh baru seperti K.H. Sam"un dan para muridnya, adalah salah satu contoh yang telah ikut serta mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan

kedaulatan NKRI di tanah Banten saat menjabat Residen Pribumi pertama di Banten.

B. Sekolah Ala Belanda dan Perubahan Sosial-Budaya

Setelah memasuki abad ke 19 Banten memang termasuk daerah yang dapat ikut menyaksikan perubahan besar-besaran. Terutama sekali setelah dibangunnya jalan kereta api di Banten. Segera setelah itu melalui proses asimilasi antara penduduk Banten asli dengan penduduk luar daerah terutama sekali dari Jakarta dan Pariangan. Gambaran singkat ini ditulis dalam sebuah aratikel di bawah tajuk *Dari Bodo Sampei Pinter* yang dipublish di Koran Banten Bode, tidak ada keterangan siapa penulis artikel tersebut. Nampaknya penulis seorang yang berpandangan progresif dengan memuji berbagai kemajuan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Banten setelah modernisasi transportasi dan pendidikan berhasil dilakukan.

Yang menarik dari artikel tersebut, perhatiannya yang besar mendeskripsikan bagaimana fungsi modernisasi alat transformasi berhasil membawa arus asimiliasi masyarakat yang berdampak kepada perubahan *cultural-views* masyarakat Banten. Penulis artikel "*Dari Bodo Sampe Pinter*" menyebut masyarakat Banten mayoritas tidak banyak mengerti soal kesehatan, mengurus rumah tangga dan kurang pengetahuan, tentu saja di

antara faktornya adalah minimnya sekolah-sekolah yang dibangun di Banten, kepercayaan kepada tahayul atau *bid'ah*, bahkan sampai tahun 1926 saat artikel tersebut ditulis dan dipublikasikan. Banyak laki-laki yang memanjangkan rambut, minimnya lapangan kerja, model pakaian yang masih berbahan tenunan sampai masalah perkawinan. Kebanyakan para orang tua enggan menikahkan anak gadisnya kepada „orang bergajih" atau para pegawai pemerintahan. Para orang tua lumrahnya lebih suka jika anak-anak gadisnya dinikahkan atau dinikahi oleh para saudagar dan tani. Kelompok priyayi pun bukan orang-orang lulusan sekolah-sekolah tinggi ala Belanda. Mayoritas tingkat pendidikan kaum priyayi hanya bisa menyelesaikan tingkat dasar bahkan tidak sekolah tapi cukup bisa baca tulis, asal bisa mimpin (Banten Bode, 27 November 1926).

Berdasarkan laporan arsip Belanda yang tersimpan di ANRI diketahui bahwa sekolah pertama untuk kaum pribumi berdiri tahun 1874. Sekolah itu adalah *openbaar inlandsche school Iste klass* terdapat di Tangerang. Menyusul dua sekolah di Caringin, berdiri tahun 1976 dan di Cilegon berdiri tahun 1877. Meski begitu sudah ada laporan bahwa sejak tahun 1861 sudah ada kegiatan pengajaran baca tulis yang diajarkan seorang guru pribumi kepada anak-anak pribumi. Pada tahun

berikutnya sekitar tahun 1862 bertambah dua orang. Sayangnya tidak ada laporan précis yang bisa menjelaskan lebih banyak lagi tentang sosok dua orang guru serta aktifitasnya di Banten (Mufti Ali, 2015: 35-36).

Memasuki tahun 1892 Belanda melakukan reorganisasi terhadap sekolah pribumi. Mereka mengklasifikasikan sekolah pribumi ke dalam dua jenis, kelas satu untuk kalangan elit pribumi, dan kelas 2 untuk kalangan kelas menengah. Semua sekolah dikonversi menjadi sekolah pribumi kelas dua yang terdapat di empat ibu kota masing-masing kabupaten: Rangkasbitung, Cilegon, Serang dan Pandeglang. Sampai tahun 1913 tercatat hanya ada empat sekolah kelas satu dan 23 sekolah kelas dua yang tersebar di 23 kewedanaan. Mereka yang lulus dari sekolah kelas dua tetap diberikan hak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti HBS, MULO, AMS, ELS dan STOVIA. Contoh kasus seorang anak patih asal Menes diterima di ELS pada tahun 1892. Dan tiga orang anak kepala stasiun kereta api diterima di ELS pada tahun 1904. Siapa pun dari kalangan pribumi kelas menengah atau rendah hanya dapat melanjutkan pendidikannya atas izin pemerintah (Mufti Ali, 2015: 36). Untuk jumlah peserta didik yang belajar disekolah-sekolah ini, memang terbilang tidak begitu memuaskan dibanding dengan jumlah penduduk

Banten seluruhnya. Hampir setiap sekolah hanya mampu meluluskan antara 50 sampai 60 siswa saja.

ELS mungkin tergolong sekolah yang istimewa karena sekolah ini sebenarnya diperuntukan anak-anak Eropa. Tetapi kalangan pribumi diberikan izin mengikuti sekolah ini. Melalui sekolah ini anak-anak pribumi dapat duduk sederajat dan belajar bersama anak-anak Eropa yang diakui dalam stratafikasi sosial Hindia Belanda saat itu menduduki kelas pertama. Sekolah kelas satu dan dua juga mengajarkan bahasa Belanda. Tetapi ELS memiliki daya tarik berbeda dengan tentu saja gengsi yang berbeda dari kedua sekolah itu. Sampai tahun 1929 terdapat 13 sekolah kelas dua yang mengajarkan bahasa Belanda. Sebagiannya mengalami reorganisasi menjadi HIS di tahun 1914, di Banten sampai tahun 1934 hanya ada 5 sekolah. Tetapi sekolah ini berhasil melahirkan para alumni melek huruf dan dapat mengakses ke sumber-sumber pengetahuan berbahasa Eropa (Mufti Ali, 2015: 37).

Itu tidak menjamin pemerataan jumlah melek huruf di Banten, sampai tahun 1934 berdasarkan laporan residen Banten, Banten adalah daerah di Jawa dengan angka partisipasi pendidikannya lebih rendah. Jika dibandingkan antara jumlah lembaga pendidikan Barat dengan lembaga pendidikan tradisional seperti madrasah dan pesantren serta majlis ta"lim,

jumlahnya masih ketinggalan. Jumlah sekolah pribumi hanya mencapai angka 250, sedangkan pesantren dan madrasah 691 dengan total santri 11.784, sedangkan jumlah majlis pada tahun itu 534 dengan jumlah santri mencapai 10.164 (Mufti Ali, 2015: 198-199).

Beberapa fakta cukup menarik diperhatikan, walau pun kepesertaan pribumi dalam sekolah-sekolah Belanda angkanya masih rendah, para alumni sekolah Belanda dengan pengalaman pendidikan modernnya telah ikut mengambil peran dalam usaha perubahan sosial di Banten. Sebut saja Perguruan Matlaul Anwar menjadi contoh yang cukup representative untuk kasus ini. Di mana kita temukan beberapa pendiri dan penyokong utamanya adalah para alumni HIS. Entol Yasin dan Entol Jasudin keduanya adalah laumni HIS yang berhasil berkarya bakti untuk masyarakat Banten (Mufti Ali, dkk, 2018: 84-96), peninggalannya sampai sekarang masih tetap berdiri dan berkontribusi sekaligus ikut mengisi sejarah pendidikan Islam modern di Banten.

Hasan Djajadiningrat perlu disebut contoh lain dalam konteks ini. Perannya di dalam SI sebagai alumni HBS di Batavia tidak terlepas dari Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat yang menyarankan profil calon pimpinan SI di Banten kepada Goenawan saat menemuinya untuk rencana

pendirian SI di Banten melalui Serang (A. Djajadiningrat, 1996: 349). Masih banyak perkumpulan-perkumpulan di luar sdunia pendidikan, yang memberi kontribusi besar kepada kemajuan masyarakat Banten yang digawangi oleh para alumni sekolah-sekolah Belanda. Seperti Budi Banten dan Tirtayasa.

Kondisi sekolah Eropa *(Openbare Europeesche School)* yang didirikan oleh pemerintah sampai tahun 1930 kondisinya masih jauh dari harapan. Hal ini, menurut Residen Creamer, disebabkan oleh kebanyakan murid yang bersekolah adalah pribumi ditambah guru yang bertugas di sekolah-sekolah milik pemerintah kerap kali berganti. Ditambah lagi dengan peraturan pemerintah untuk rekrutmen murid yang lebih diperketat, hanya anak-anak priyayi dan ibunya bisa berbahasa Belanda yang bisa diterima di sekolah Eropa. Mutu sekolah Eropa masih berada di bawah mutu sekolah untuk pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda (ANRI, 1980: LXII).

Sekolah untuk golongan pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda (Hollandsch Inlandsche School/HIS terdapat di Serang, Cilegon, Pandeglang dan Rangkasbitung. Mutunya cukup baik, tetapi dibandingkan dengan sekolah untuk anak-anak Eropa masih belum bisa setara. HIS Cilegon paling kurang merasakan kelebihan murid, ini disebabkan murid yang berasal dari Cilegon dan sekitarnya tidak cukup

banyak. Lingkungan Cilegon saat itu masih belum cukup maju jika dibandingkan dengan daerah lain (ANRI, 1980: LXII). Ini berarti angka partisipasi pendidikan penduduk Cilegon masih kecil. Oleh karena itu tidak heran jika setelah memasuki 1934 HIS di Cilegon diturunkan menjadi *Schakelschool*, demikian laporan de Kanter (ANRI, 1980: CI).

Sekolah untuk pribumi yang didirikan oleh pemerintah ada berbentuk sekolah desa dengan lama belajar 3 tahun, sekolah kelas II dengan lama belajar 5 tahun dan ada juga OSVIA (*Opleideingschool Voor Inlandsche Ambtenaren*/Sekolah Pendidikan Pangrehpraja). Sekolah untuk pribumi kelas II di Cilegon baru akan dibuka setelah peristiwa Geger Cilegon 1888 meletus (PA. Djajadiningrat, 67). Pada umumnya hampir semua sekolah pribumi di Banten memiliki masalah yang sama, yaitu masalah pendanaan. Karena sekolah pribumi ini hampir seluruh dana pendidikannya diserahkan kepada penduduk dengan beban biaya yang tinggi. Persebarannya sebenarnya lebih dipaksakan, sehingga menjadi wajar jika pada perjalanannya tidak sebaik yang diharapkan. Di Cilegon ada 25 sekolah pribumi yang beroprasi dengan tingkat absensi yang masih tinggi (ANRI, 1980: CII).

Melihat realitas semacam ini kaum muslim modernis atau setidaknya kaum muslim terdidik melihat tuntutan zaman

ke depan menghendaki orang-orang Islam pribumi mendapatkan pendidikan yang layak dan setara dengan orang-orang Eropa dan elit pribumi. Di Banten organisasi Serikat Islam memiliki peran penting menyediakan sekolah-sekolah ala Belanda untuk kaum pribumi yang tidak saja untuk kelas elit tetapi untuk kalangan menengah dan bawah. Fenomena ini diakui oleh Residen Banten J.C. Bedding, Serikat Islam sangat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan sekolah-sekolah swasta ala Belanda di Banten. Bahkan banyak sekolah yang didirikan Serikat Islam berjalan dengan normal dan stabil bahkan dapat berkembang dengan baik dibandingkan sekolah-sekolah Belanda yang didirikan pemerintah (ANRI, 2004: xxviii).

Untuk wilayah Cilegon al Khairiyah telah memainkan peran penting yang mampu menyaingi kiprah Serikat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan modern. Al-Khairiyah juga ikut membuka HIS yang dipadukan dengan pelajaran-pelajaran agama di samping al-Khairiyah mengembangkan madrasah yang bergaya modern.

C. Pesantren Citangkil: Transformasi Pendidikan Islam Tradisional di Banten

Berdasarkan survey pemerintah keresidenan Banten, seperti sudah kita singgung di atas, jumlah pesantren dan madrasah mencapai 691. Pesantren Citangkil salah satu dari jumlah tersebut. Pesantren Citangkil adalah cikal bakal Madrasah al Khairiyah yang didirikan oleh K.H. Syam"un. Didirikan untuk pertama kalinya tahun 1916 dan berjalan sampai tahun 1923. Di dalam pesantren tersebut K.H. Syam"un menyelenggarakan pendidikan tradisional yang mengajarkan kitab-kitab kuning kepada para santrinya seperti lumrahnya pesantren-pesantren yang berdiri di Banten. Di tahun 1924 K.H. Syam"un menunaikan ibadah haji dan mukim di Mekah selama kurang lebih satu tahun. Setelah kembali dari Haji, ia mengaktifkan kembali kegiatan pendidikan di Citangkil. Rupanya pengalaman berhaji kali ini memberi inspirasi baru kepadanya. Ia pun mentransformasikan Pesantren Citangkil menjadi madrasah bergaya modern, ia namakan madrasah ini al-Khairiyah (Mufti Ali, dkk., 2018: 14- 18).

K.H. Syam"un sendiri merupakan alumni Mekah dan Kairo. Dalam rentang tahun 1905-1910 ia belajar di Mekah dan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas al-Azhar

Kairo dari tahun 1910-1915, lima tahun setelah wafatnya Syekh Muhamad Abduh di tahun 1905, tepatnya 11 Juli 1905, saat menjabat Syekh al-Azhar. Abduh sendiri memberikan pengaruh besar di Mesir, termasuk pembaruan dan perbaikan-perbaikan atas al-Azhar sejak ia kursi anggota Majlis A"la al-Azhar di tahun 1894 (H. Nasution, 1975: 62; Indira Falk Gesink, 2010: 210), dan banyak murid-muridnya yang mewarisi pemikiran-pemikiran pembaruannya di al-Azhar, mugkin yang perlu disebut di sini adalah Syekh Muhamad Bakhhit, Syekh Mustafa al-Maraghi, dan Syekh Ali Surur al-Zankaluni (H. Nasution, 1975: 77). Di tahun 1916 ia kembali ke Mekah sebagai seorang guru di bidang fiqih. Ia mengajar banyak santri dari Banten dan Jawa Barat sampai akhir 1916 (Mufti Ali dan Permana, 2018: 3). Selama kurun itu ia bersentuhan langsung dengan tradisi intelektual Islam di kedua negara itu dan gerakan nasionalisme Mesir.

Dari kalangan al-Khairiyah sendiri ada pengakuan bahwa nama al-Khairiyah terinspirasi sebuah organisasi pergerakan pelajar muslim asal tanah Nusantara *Jama"at al-Khairiyah al-Talabiyah al-Azhariyah al-Jawiyah* yang dipimpin untuk pertama kalinya oleh Djanan Thaib. Ada kemungkinan K.H. Syam"un mengetahui bahkan menjadi anggota dari perkumpulan ini. Seperti dituturkan William Roff, para pelajar asal Indonesia

dan Malaysia banyak yang terlibat di dalam organisasi ini (William R. Roff, tth: 73; Mufti Ali, 2016: 171). Dengan membawa nama itu sepulangnya dari Haji di tahun 1925, pesantren Citangkil yang dulu pernah dibinanya ditransformasikan menjadi sebuah madrasah ala institusi-institusi pendidikan Islam di Timur Tengah. Pengembangan madrasah al-Khairiyah dilakukan dalam dua tahap. 1933 al-Khiriyah dikembangkan menjadi 11 tahun. Selama kurun 1925-1930 siswa yang belajar di al-Khairiyah menghabiskan waktu 9 tahun. 2 tahun persiapan, 3 tahun madrasah ibtidaiyah dan 4 tahun kelas tsanawiyah. Setelah tahun 1933 al-Khairiyah membuka kelas *mua'limin* (Mufti Ali, dkk, 2018: 22; Mufti Ali, 2016: 174-177).

Melihat perkembangan al-Khairiyah begitu signifikan, para pengurus al-Khairiyah harus mulai memikirkan jalan menjawab tantangan masa depan al-Khairiyah. Maka didirikanlah sebuah koperasi bumi putra oleh para pengelola al-Khairiyah yang tidak lain mereka adalah para alumni pesantren Citangkil. Koperasi ini didirikan pada tahun 1928 yang tujuannya tidak lain untuk menopang masalah finansial al-Khairiyah sekaligus menjadi wadah sosial-ekonomi untuk membantu masyarakat di sekitar al-Khairiyah.

Berangkat dari kesadaran persaingan pasar dengan pedagang asing yang sangat ketat, apalagi Cina berhasil menguasai perdagangan di Cilegon K.H. Syam"un berpikir bahwa al Khairiyah haruslah memiliki sayap usaha yang mampu menjembatani petani-petani lokal agar mereka mampu berdaya dan meningkatkan kesejahteraan tanpa dikuasai oleh etnis Cina terlebih orang-orang Eropa. Berdirilah Koperasi Boemi Putra yang dipimpin oleh Abdul Aziz Kartawirawan. Kondisi perekonomian dan pertanian di Banten sejak tahun 1924 tengah mengalami kemerosotan. Tentu saja di luar persaingan dengan pihak asing, persoalan produktifitas pertanian dan perkebunan masyarakat Cilegon khususnya sedang kurang menguntungkan. Koperasi ini memiliki peran besar di tengah situasi ekonomi Cilegon yang demikian. Koperasi Boemi Putra banyak memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat sekitar dengan dasar gotong royong. Sekian persennya dana yang dikelola koperasi ini diperuntukan membantu pasokan dana oprasional madrasah.

Koperasi Boemi Putra mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda pada tanggal 20 Juni 1928 dengan susunan kepengurusan: K.H. Abdul Aziz sebagai ketua, K.H. Abdurahim sebagai sekretaris, K.H. Syam"un sebagai

bendahara. Ada pun yang menjadi anggota adalah K.H. Aliudin, K.H. Kasiman, K.H. Sariman dengan masa jabatan 25 tahun lamanya (Mufti Ali, 2015: 69).

Pada tahun 1931, lima tahun setelah beroperasi madrasah ini, al-Khairiyah mendirikan sebuah organisasi yang digerakan oleh para alumni, guru dan siswa dewasa, yaitu *Jam"iyat Nahsdhati Syubbanil Muslimin*, tepatnya tanggal 21 Juni 1931. Organisasi ini dipimpin langsung di bawah binaan K.H. Syam"un dan dipimpin oleh K.H. Ali Jaya seorang guru bantu di al-Khairiyah. Salah satu tugas yang diemban organisasi ini adalah membantu pengembangan al-Khairiyah untuk memperluas ruang pengabdiannya, termasuk pendirian cabang-cabang al-Khairiyah dan kaderisasi para alumni al-Khairiyah (Mufti Ali, dkk, 2018: 20).

Melalui organisasi yang dikelola oleh para alumninya ini al-Khairiyah berhasil meraih pencapaian yang gemilang. Menjelang kemerdekaan RI al-Khairiyah berhasil membuka cabang di berbagai daerah. Al-Khairiyah sudah memiliki 48 cabang di Banten, Lampung, dan Palembang hanya dalam kurun 1929 sampai 1945 (Mufti Ali, dkk, 2016: 180). Prestasi ini tentu saja hanya mungkin dicapai oleh militansi para pengurus dan para alumni yang didukung oleh relasi sosial

yang baik. Dan K.H. Syam"un berhasil membangun itu didalam tubuh para alumninya.

Angka tersebut tentu saja berhasil menyaingi usaha pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah modern. Yang menarik dari pergerakan al-Khairiyah dalam upaya mencerdaskan orang-orang Banten tidak bersikap eksklusiv. Al-Khairiyah pun menerima sistem pendidikan Belanda (HIS) dan ikut mengembangkannya. Pada tahun 1936 *Holandsch Inlandsch School (HIS)* di perguruan al-Khairiyah pusat Citangkil. Pendirian HIS di al-Khairiyah berangkat dari rasa keprihatinan K.H. Syam"un kepada pendidikan Islam tradisional yang tidak mampu bersaing dengan pendidikan Barat yang dikembangkan Belanda (Mufti Ali, dkk, 2018: 23-24). Pendirian HIS ini sebenarnya lebih cenderung kepada usaha islamisasi HIS, sehingga masyarakat yang ingin sekolah di HIS tapi ia tidak menginginkan tercerabut dari nilai-nilai kultural lokal, khususnya keislamannya. Sebab di dalam HIS ini mata pelajaran agama keislaman tetap diajarkan. Yang menjadi guru HIS adalah alumni-alumni al-Khairiyah seperti Chusnul Achyar (Pulo Merak), Idris (Bandung), Abdurahman (Lampung), Sahdi (Cianjur), Asjikin Hamim (Lampung), Sjahsiam (Cianjur) (Mufti Ali, dkk, 2018:24-25).

Al-Khairiyah terus mengalami perkembangan dan kemajuan dari masa ke masa meski pun mendapat penetrasi dari kalangan pemerintah kolonial Belanda dan Jepang. Al-Khairiyah menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang dicurigai oleh pemerintah sebagai tempat yang akan mencetak kaum pejuang melawan kolonial. Dalam tekanan politik seperti itu al-Khairiyah tetap mampu bertahan sampai sekarang.

D. Heroisme Pendidikan al-Khairiyah

K.H. Syam"un telah menanamkan semangat patriotism dengan baik kepada para santrinya sejak awal. Pengalaman belajarnya di Mekah dan Mesir mengajarkan nilai-nilai heroisme yang besar kepadanya. Mesir baginya menjadi sampel yang tepat untuk pengkaderan murid-muridnya yang kelak mampu melanjutkan perjuangannya di al-Khairiyah dan memberi sumbangsih yang berarti kepada bangsa. Kita bisa melihat mars Syubbanul Muslimin yang dilantunkan setiap hari menjelang kegiatan belajar dan pada acara-acara al-Khairiyah begitu kental dengan semangat patriotisme. Berikut ini akan kita lihat bersama mars Subbanul Muslimin:

Mars

Kita gerakan pemuda muslim Indonesia

Diikat oleh satu ikatan, agama Islam

Kita setara di setiap jenjang dan barisan

Dalam menegakan dan menjunjung tinggi agama Allah

Reff:

Hai bangsaku, Indonesia!

Bangkitlah dan gerak perkasa menuju surga

Di dalam perlawanan dan perang besar

Mempertahankan agama dan tanah air Indonesia

Tepiskan rasa takut menghadapi kekuatan asing yang kuat

Memang kini mereka tengah bersuka cita

Tepiskan rasa takut menghadapi kekuatan asing

Sadari, di setiap kita ada jaminan Allah yang Maha Agung.

Berdasarkan keterangan para alumni tua al-Khairiyah mars ini masih tetap dikumandangkan oleh para siswa-siswi al-Khairiyah sampai akhir tahun 1960 (Mufti Ali dan Permana, 2018: 9). Syair ini berhasil membakar semangat anak-anak al-Khairiyah. Tidak saja mars ini yang membakar semangat patriotism anak-anak al-Khairiyah, K.H. Syam"un mewajibkan para siswanya menghafal tembang-tembang motivasi yang terdiri dari 30 syair. Setiap syair memiliki 2 sampai 4 bait berbahasa Arab. Penyusunan dan pencetakannya dibawah

arahan dan supervise K.H. Syam"un langsung. Syari-syair tersbeut kemudian dicetak dengan judul besar *Majmu" al-Anasid li Nahdhati Syubbani al Muslimin* pada tahun 1937 untuk siswa dan siswi perguruan al-Khairiyah (Mufti Ali dan Permana, 2018: 9). Berikut kami kutipkan beberapa penggalan syairnya.

Syair ke 7

Kali wahai para tunas-tunas muda

Cahaya cita-cita, bintang petunjuk dan orientasi ketinggian martabat

Berbaktilah kepada negerimu dan curahkanlah perhatian penuhmu

Apa yang telah kalian persiapkan untuk masa depanmu

Wahai para tunas-tunas muda

Kiprah apa yang sedang kamu lakukan sekarang?

Agar negerimu bahagia dan sejahtera

Karenamu di masa yang akan datang.

Syair 11

Kedamaian, kedamaian, untuk bangsa kita kedamaian

Kita akan mencapai apa yang kita cita citakan

Untuk bangsa kita keamanan

Bangsa kita tinggi cita-citanya

Berharap menggapai harapan yang besar

Kehinaan adalah kematian kehidupan,

tidak ada kehidupan bagi bangsa yang hina

barang siapa yang mencita-citakan kemuliaan

ia mengingat kematian agar ia dapat hidup

bekerja, bekerja sampai kapan pun bercita-cita

marilah kita marilah kita berjuang menjadi yang terdepan

kita optimalkan etos kerja untuk menja tuk menjaga warisan leluhur kita

sungguh hal itu akan membuatmu jaya di dunia

syair 17

wahai putra putri bangsa

negeriku adalah darahku kami akan menjaganya

dari ancaman yang datang dari lautan dan daratan

Reff:

Negeriku bangsaku, kami adalah pemilikmu

Kami akan menjagamu, dengan jiwa raga kami

Kami akan melindungimu.

Syair-syair ini berhasil menanamkan semangat patriotisme dan nasionalisme yang kuat ke dalam hati para

santri al-Khairiyah. Terbukti setelah kemerdekaan RI diproklamasikan banyak santri al-Khairiyah terlibat di dalam usaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. K.H. Syam"un sendiri menjabat bupati Serang dan beberapa muridnya aktif sebagai politikus menjadi anggota BKR dan TKR kemudian BPUPKI. Abdul Fatah Hasan, Syadeli Hasan, Ali Jaya, Qurtubi Janah dan lain sebagainya adalah tokoh-tokoh lapis kedua di al-Khairiyah setelah K.H. Syam"un yang ikut terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI (Mufti Ali dan Permana, 2018: 11). Dua orang tokoh al-Khairiyah yang gugur sebagai kusuma bangsa di antara mereka adalah K.H. Syam"un dan K.H. Abdul Fatah Hasan. Tokoh yang terakhir ini akan kita perbincangkan dalam bab-bab berikutnya.

Kiprahnya di dunia pendidikan sudah tidak di ragukan lagi. Qurtubi Jannah beberapa kali memagang tampuk kepemimpinan menjadi kepala madrasah, kepala madrasah ibtidaiyah pengoreng di jabatnnya sebelum berangkat studi ke mesir yakni sejak 27 Januari 1950 sampai dengan Juni 1956, ia juga pernah menjadi kepala madrasah ibtidaiyah Mu"wanat al syuban Kaujon yang di pegangnnya sejak tanggal 2 Februari 1977. Kepemimpinan kembai terlihat pada saat ia menjabat

Wakil Dekan 1 Fakultas Syari"ah IAIN serang dari tahun 1971 samapai dengan 1974.

Dalam bidang organisasi, ia sejak masih belajar telah aktiv di berbagai organisasi pelajar pertama yang di ikutinya adalah GPII (Gerakan Pelajar Islam Indonesia). Periode tahun 1950-1956, ia menjabat sebagai ketua GPII cabang Bojonegoro ketika GPII pusata menyelenggarakan pelatihan pengkaderan, ia mengikutinya selama 15 hari di bandung (14-28 Maret 1954). Selain itu, ia juga aktiv menjadi Pengurus Mesjis Ilama Indonesia Kabupaten Serang Priode 1970-1972.

Sebagaimana umumnnya para pelajar pada masa-masa tahun 9140-an yang tidak hanya belajar di ruangan-ruangan kelas, Qurtubi Jannah juga terlihat secara aktiv dalam dunia kemiliteran, pada tahun 1945, ia berlatih kemiliteran di Bogor selama 3 bulan. Kemudian pada tahun yang sama, ia di beri pangkat sersan mayor dan menjadi Kepala Staf BArisan Markas Divisi 1000 Brigadie Tirtayasa.

Qurtubi Jannah wafat pada tahun 1977. Sebagai pangakuan pemerintah atas jasa-jasanya mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia, pemerintah menganugrahkan gelar Kehormatan Veteran Kemerdekaan RI tanggal 15 Agustus 1981.

Demikianlah beberapa alumni terbina lulusan al-Khairiyah awal. Terlihat mereka tidak hanya mampu menjadi tokoh agama di daerah-daerah tempat mereka tinggal, akan tetapi mereka juga menjadi kader-kader yang heroic dengan melibatkan diri dalam upaya-upaya perjuangan kemerdekaan. Demikian halnnya dalam keikutsertaan organisai-organisasi kemasyarakatan, alumni al-Khairiyah memiliki pilihannya masing-masing hal ini mengindikasikan bahwa alumni-alumni al-Khairiyah masa awal cendrung bersikap tebuka dan toleran terhadap sikap dan pilihan orang lain yang berbeda dengan dirinya.

E. Al-Khairiyah dan Kemunculan Kelompok Intelektual Baru

Beberapa riwayat tokoh al-Khairiyah memperlihatkan kontribusi al-Khairiyah dalam melaihirkan elit-elit agama dan masyarkat yang mampu bekerja sama dan bahkan menjdi bagian dari birokrasi pemerintahan. Hal ini merupakan terobosan baru karena tidak sedikit para tokoh agama di Banten yang menjauh dan menolak ikut menjadi bagian dari Pemerintah. Impilkasi dari sikap seperti ini, lebih jauh, adalah tidak tersediannya tenaga-tenaga professional yang mau dan mampu memegang peran pada birokrasi pemerintah .ketika

Bnaten menjadi provinsi pada tahun 2000, hampir sebagian besar posisi strategis pemerintahan di pegang oleh orang-orang dari luar Banten yaitu daerah priyangan.

Modernisasi kota Cilegon menjadi bagian tak terpisah dari proyek nasional yang digulirkan oleh Soekarno dalam rangka membangun satu bangsa yang baru mendapatkan kemerdekaan. Dalam istilah Soekarno masa-masa pembangunan Cilegon ada dalam periode *investment*, sebagai tahap lanjutan ketiga setelah periode revolusi fisik dan survival. Cilegon dipersiapkan sebagai kantong investment di bidang material. Karena – menurutnya – untuk membangun Indonesia, kita butuh pasokan besi dan baja serta yang lainnya, yang dianggap layak dipertimbangkan adalah Cilegon sebagai daerah segi tiga yang menghubungkan berbagai kantong biji besi Indonesia (Mufti Ali, dkk, 2016: 191).

Kalau kita bicara modernisasi Kota Cilegon menurut informasi koran Kompas, Minggu 10 Juli 1988, perubahan ini mulai terasa sejak awal tahun 1970. Ketika pemerintah pusat menetapkan Cilegon sebagai Kota Administratif pada bulan September 1986, pemerintah harus mengimbangi berbagai perubahan besar dengan banyak konsekuensi yang tidak sederhana. Koran Kompas menggambarkan diantara cirri perubahan menuju modernisasi secara cepat dapat dilihat dari

berdirinya banyak fasilitas umum kelas atas yang mulai dibangun di Cilegon. Seperti lapangan golf dengan kapasitas 16 *hole*, satu fasilitas olah raga mahal yang tidak dimiliki oleh kota provinsi sekali pun, ada di Cilegon. Cilegon di tahu 1980-an memiliki enam bioskap dengan kualitas memadai. Enam tempat bilyar, tiga tempat permainan keterampilan, dan sebuah tempat rekreasi. Ada 22 hotel dan 15 rumah makan, bahkan dua diantaranya sudah menyajikan makanan asing (Kompas, Minggu, 11 Juli 1988: 1).

Belum lagi ditambah pelabuhan-pelabuah kepal laut dengan kapasitas besar, bank yang tidak sedikit, lembaga asuransi dan lain-lain adalah indikator laju cepat Cilegon menjadi sebuah kota metropolitan di Banten. Cilegon telah menjadi incaran para investor asing, dan sangat dipertimbangkan dengan angka penduduk pada tahun 1980-an mencapai 200.000, Cilegon telah benar-benar menjadi kota yang tidak pernah tidur.

Perubahan yang pesat ini tentu saja efek dari berdirinya PT. Krakatau Steel dengan anak perusahaannya serta perusahaan-perusahaan lainnya. Kehadiran BUMN PT. Krakatau Steel yang merupakan penghasil tunggal untuk kebutuhan baja dan besi di Indonesia (Beroperasi sejak tahun 1978 dan didirikan tahun 1971 sebagai kelanjutan dari proyek

yang sempat mandeg di tahun 1965) telah menjanjikan banyak kalangan, termasuk bagi berbagai pihak yang tinggal di Cilegon, PT. Krakatau Steel memberikan cipratan rizki melalui dana CSR-nya atau dana-dana lainnya (Kompas, Minggu, 10 Juli 1988).

Tentu saja perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialis yang cepat itu membawa serta problem sosial yang tidak sederhana di samping mendatangkan keuntungan yang optimistis. Dalam tinjauan kritis koran Kompas, program modernisasi atau industrialisasi Cilegon yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya tak ubahnya pemerintah Belanda di era kolonial yang memicu konflik sosial 1988. Kehadiran perusahaan bergengsi ini memang telah mendorong kemajuan yang sangat pesat. Namun tidak dipungkiri bersama laju kemajuan yang pesat itu, ketidakseimbangan sosial juga nampak mewarnai Cilegon yang sedang berlari itu. Seperti kepadatan penduduk yang meningkat tinggi mencapai angka 1.136 per kilometer. Pengembangan tata ruang Cilegon terbentur langsung dengan geografis yang dimilikinya, bebukitan di selatan dan lautan di bagian utara memaksakan pemerintah hanya dapat memanfaatkan setengah lahan saja. Belum lagi dipersulit masalah air bersih. Pasokan air dari Rawa Danau tidak bisa

menjanjikan apa-apa untuk kebutuhan air bersih masyarakat Cilegon (Kompas, Minggu, 11 Juli 1988: 1).

Meski modernisasi bagi masyarakat Cilegon menjadi satu hal yang tak terpungkiri lagi, tapi eksesnya cukup terasa, dimana norma-norma keagamaan yang kental pada masyarakat Banten berbenturan langsung dengan *lifestyle* yang modern. Tentu saja ada pergeseran budaya yang sangat besar dari agraris ke indusitrialis dengan konsekuensi tersingkirnya norma-norma religious oleh sekularisme yang lekat pada masyarakat industrialis. Indikator sederhananya, posisi pesantren yang sangat sentral sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat mulai ditinggalkan. Hal ini diakui oleh kedua tokoh ulama Cilegon K.H. Rahmatullah Syam"un dari al-Khairiyah dan KH. Nadjiullah Luthfi dari Jauharunuqiyah saat diwawancarai oleh Kompas (Kompas, Minggu, 10 Juli, 1988: 1).

Seperti diakui oleh koran Kompas, bahwa pendirian PT. Krakatau Steel di Cilegon membawa komitmen politik kekuasaan dan politik sosia-budaya. Soekarno telah mencanangkan pembangunan perusahaan itu dengan nama PT. Trikora atas bantuan dan Uni Sovyet. Setelah pemberontakan PKI gagal pada tanggal 30 September 1965, dan kekuasaan beralih kepada Soeharto, maka perusahaan

bergengsi ini dirubah menjadi PT. Krakatau Steel dan kembali dibangun pada tahun 1971 (Kompas, Minggu 10 Juli 1988: 1).

Uni Sovyet telah menanam dana investasi untuk proyek nasional Trikora sebesar 37.799.319 US dolar dengan dana dalam negeri sebesar Rp. 85 milyar (Bonnie Traya, 2016: 194). Bagaimana pun harus diakui bahwa Uni Sovyet dalam masa-masa investment Indonesia selalu menyiapkan bantuan-bantuan kerja sama kepada Soekarno. Sebagai contoh ketika Soekarno mencanangkan merebut Irian Barat dari tangan Belanda, Uni Sovyet adalah negera yang memberikan bantuan dana yang besar kepada Indonesia untuk kebutuhan pengadaan persenjataan, dana yang dikucurkan kepada Indonesia oleh Uni Sovyet mencapai 450 juta US dolar (Cantweld dan Utrecht, 2011: 228). Dalam posisi yang sama Amerika Serikat selalu memberikan perhatian kepada dinamika politik internasional Indonesia. Amerika sendiri sangat menginginkan agar Indonesia berpaling dari Uni Sovyet.

Sementara waktu, Soekarno harus menyelesaikan banyak intrik politik antar dua kubu yang terus bersaing, kubu partai politik yang dibintangi oleh PKI dan PNI, kubu yang lainnya adalah TNI. Elit militer selama pemerintahan Soekarno telah mengambil peran penting di berbagai lini. Tidak saja menguasai administrasi sipil, mereka juga menguasai

perusahaan-perusahaan milik negara. PKI sebagai parpol yang tidak suka keterlibatan TNI melewati batas wewenangnya, sangat berharap dan memang terus mencari jalan menggeser kedudukan mereka khususnya kedudukan administrasi sipil dan perusahaan-perusahaan milik negara. Tentu saja PKI memiliki peluang besar menyingkirkan TNI dari dua ranah tersebut mengingat dalam sidang MPRS tanggal 11 April 1965, Soekarno mengakui kegagalan rencana Deklarasi Ekonomi (DEKON) delapan tahunan itu separuh besarnya disebabkan oleh militer. Selain adanya suap-menyuap antara elit militer dan perwira menengah untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan tertentu, belanja militer yang berlebihan ikut menggagalkan rencana pengembangan ekonomi nasional. Dan tentu saja pengaruh bantuan hutang dari negara asing untuk kepentingan impor dan proyek-proyek strategis telah ikut memperbesar dampak terhadap kegagalan DEKON (Cantweld dan Utrecht, 2011: 229-230). Termasuk di dalamnya proyek pembangunan pabrik baja Trikora, menjadi salah satu lahan yang gagal dibangun oleh Soekarno.

Peristiwa G 30 S-PKI telah menjadi pukulan telak kepada Soekarno sekaligus menandakan akhir perjalanan kekuasaan pemimpin revolusi. Tapi itu tidak menjadikan seluruh program pembangunan ekonomi gagasan Soekarno

ikut berakhir. Kekuasaan Soeharto justru hanya bekerja melanjutkan seluruh pekerjaan Soekarno, termasuk PT. Trikora yang sempat tertunda akibat proses pengusutan dalang-dalang pemberontakan. Pada tahun 1966 pemerintah mengintruksikan seluruh proyek pembangunan yang didanai oleh negara sosialis harus segera dihentikan untuk mencegah banyak hal yang tidak diinginkan. Proyek ini pun kembali berjalan di atas puing-puing pembangunan yang gagal di masa Soekarno selama beberapa tahun dari tahun 1970-an sampai 1980-an. Perusahaan ini baru beroperasi pada tahun 1977, dan pembangunannya serta perluasan lahannya mulai diresmikan Soeharto pada tahun 1979, 1983, 1985, 1987. Soeharto pun dengan mantap melakukan diplomasi secara sosial-politik dengan rakyat Banten melalui tujuan proyek ini untuk mengangkat kehidupan rakyat Banten yang dalam waktu bersamaan justru tengah mengalami keresahan kemiskinan agraris (Mufti Ali, dkk, 2016: 195).

Soeharto akhirnya tidak dapat menyelesaikan masalah pembangunan PT. KS dengan bersih. Sekarang masalah yang ditemui justru berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat Cilegon langsung. Pembangunan KS mendatangkan tanggapan negative dari kalangan bawah. Pejabat Bapenas sendiri menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak melakukan

koordinasi yang baik dengan pihak pemerintah daerah. Bahkan persoalan ganti rugi lahan dengan masyarakat pun banyak yang terkatung-katung. Terakhir diketahui ada 13 kasus yang sampai tahun 1996 masih ditangani pengadilan (Mufti Ali, dkk, 2016: 199).

Al-Khairiyah termasuk lembaga pendidikan yang terkena penggusuran tanah sejak era Soekarno. Berkaitan dengan ini, Mufti Ali pernah mengutarakan komentarnya dalam catatan editor untuk buku *Catatan Masa Lalu Banten* karya Halwaniy Michrob, bahwa pendirian PT. KS yang memakan lahan al Khairiyah adalah faktor strategis yang sistematis untuk mematikan potensi gerakan sparatisme yang tengah hangat pasca-kemerdekaan di Banten. Rencana mendirikan perusahaan baja dan besi di Cilegon tampaknya lebih dipaksakan ketimbang pertimbangan-pertimbangan ekonomis (Halwaniy Michrob dan Chudari, 2011: v). Pada kenyataannya Cilegon tidak memiliki pasokan biji besi dan baja yang cukup untuk produksi multinasional sebagaimana temuan riset Jawatan Geologi Bandung (Mufti Ali, dkk, 2016: 194). Di balik rencana pembangunan perusahaan ini ada peran Chairul Saleh yang menjabat sebagai menteri. Dengan dalih membangun kesejahteraan rakyat, secara perlahan wacana sparatisme yang kuat di Banten dapat dipadamkan. Spekulasi historis yang

bermunculan dari pemerhati sejarah Banten modern menilai pembangunan PT. KS di Cilegon memiliki dua agenda penting: meredam gerakan sparatisme dan menghentikan segala upaya revitalisasi Kesultanan Banten dan melumpuhkan pusat pengkaderan pemuda dan pelajar Islam militant di Banten, Perguruan Islam al Khairiyah milik K.H. Syam"un (Halwani Michrob dan Hudari, 2011: vii).

Penggusuran dan relokasi al Khairiyah telah berhasil mengurangi intensitas denyut jantung pusat Perguruan Islam al Khairiyah dalam mengalirkan semangat semangat dan inspirasi mengembalikan Kesultanan Banten. Apalagi setelah K.H. Brigjend Syam"un wafat dalam pertempuran mempertahankan NKRI tahun 1949. Tentu saja relokasi paksa ini telah memicu konflik internal al Khairiyah dan pada saat itu terjadi, keteguhan al Khairiyah pun mulai memudar.

Ali Jaya merupakan salah seorang santri K. H. Syam"un generasi pertama yang sangat berjasa terhadap perkembangan al-Khairiyah baik pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan.Beliau lahir di delingseng, Kebonsari, Cilegon pada tahun 1901. Ayahnya bernama Aldin.Tidak diperoleh keeterangan lebih lanjut mengenai siapa Aldi ini.Dimungkinkan ayahnya ini berasa dari kalngan umumnya masyarakat Delingseng saat itu.

Semasa kecil Ali Jaya belajar kepada guru mengaji di kampung halamannya, Delingseng, pada usia remaja beliau melanjutkan pendidikannya di bawah bimbingan K.H. Syam"un. Pada masa ini beliau mengenal kitab-kitab berbahasa Arab yang lebih di kenal dengan istilah kitab kuning. Dipastikan masa ini beliau belum belajar ilmu-ilmu umum maupun huruf latin. Oleh karena memang yang diajarkan K.H. Syam"un dalam pesantrennya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam yang terdapat di dalam kitab-kitab klasik itu.

Ketika K.H. Syam"un mentranformasikan pesantren menjadi madrasah, Ali Jaya memiliki peran yang sangat penting. Selain belaiau di beri tugas unruk mengajar di madrasah tersebut, beliau pun piawi dalam menggalang dana untuk pengembangan pendirian gedung-gedung madrasah. Beliau tidak hanya mengunjungi para dermawan yang berada di sekitar Banten. Beliau juga seringkali mengunjungi Lampung dan sekitarnya dalam rangka mencari dukungan material.

Karena kemampuannya dalam mendapatkan dukungan masyarakat untuk pengembangan al-Khairiyah maka ketika Jam"iyyah Nahdat asy-Syuban al-Muslim di bentuk pada tanggal 31 Juni 1931, beliau dipercaya menduduki jabatan sebagai ketua pengurus (voorzitter).

Pada tahun 1929, di kampung halamnnya Delingseng, Ali Jaya mendirikan madrasah al-Khairiyah. Madrasah ini merupakan madrasah al-Khairiyah cabang pertama. Hal ini mengisaratkan bahwa kendatipun usianya saat itu masih relatif muda (kurang lebih 28 tahun) akan tetapi belliau sudah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap upaya pencerdasan anak-anak bangsa.

Tidak hanya itu, Ali Jaya, ketika zaman revolusi kemerdekaan, di tunjuk oleh bupati K. H. Syam"un untuk menduduki jabatan Camat Cinangka. Konon, menurut putranya, H. Humaedi, Ali Jaya sebenarnya menggantikan camat sebelumnnya K. H. Fatah Hasan yang dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan akut di Cinagka yaitu perampokan.

Ali Jaya, yang dikenal sebagai seorang pemberani dan ahli hikmat, menerima tawaran gurunya itu. Beliau di beri fasilitas seekor kuda yang seringkali dimanfaatkan untuk berkunjung ke kampung-kampung dan masuk keluar hutan sekitar kecamatan Cinangka Ali Jaya juga pernah menjadi kepala kantor kecamatan Pulomerak yang ada di Kerenceng. Sedangkan yang terakhir kali jabatannya di pemerintahan beliau di angkat sebagnagkasbitung.

Beliau di akhir hayatnya berangkat ke mekah untuk menunaikan haji.Akan tetapi belum sempat beliau kemadinah untuk berziarah ke makkam rosullulah, beliau terkena sakit Karena usianya pada saat itu udah udzur. Pada tahun 1982 beliau wafat.

Ketika ada program pemerintah mengenai Pembangunan Perluasan Pabrik Besi Baja mengharuskan madrasah al-Khairiyah pindah ke lokasi yang baru, Ali Jaya mengusulkan agar pemerintah membangun kembali madrasah tersebut lengkap dengan sarana dan prasarana belajarnya, seperti lapangan olahraga, alula pertemuan, asrama, kantin, dapur, masjid, perumahan guru, dan kantor. Tanah yang terkena gusuran segera di ganti menjadi luasnya tiga kali lipat dari luas tanah semula. Usulan Ali Jaya diterima yang kemudian di tuangkan dalam surat Keputusan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Gubernur Jaw Barat No. 336 tahun 1973.

Dengan demikian, bangunan madrasah al-Khairiyah pusat sekarang ini adalah bangunan baru hasil relokasi dari al-Khariyah Citangkil Zaman dulu, peran dan jasa Ali Jaya yang mewakili pihak perguruan Islam al-Khairiyah untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan sangat besar.

Salah astu kader terbaik al-Khairiyah lainnya adlah Muhamad Syadeli Hasan adik dari Abdul Fatah Hasan. Beliau

juga merupakan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI). Mendapatkan pendidikan awalnya di pesantren al-Khairiyah pada tahun 1992. Ketika baru menduduki kelas satu madrasah Tsanawiyah beliau sudah hafal Jurumiyah, awamil dan syarah ibnu Aqil. Pada tahun 1932, beliau di nyatakan lulus dari MTs al-Kairiyah. Bersama-sama untuk menimba ilmu di universitas al-Azhar. Beliau lulus pada tahun 1934 dan memperoleh ijazah al-Kahairiyah li al-Guraba, ijazah kelas persiapan untuk kuliah stara satu. Syadeli muda hanya baru menamatkan Tsanawiyyah, karena tingkat Mu"alimin belum ada. Kemudian di tahun yang sama, yaitu 1934, beliau melanjutkan ke jurusan *Tadris Li ad-Dirasah Dar al-Ilmiah berpendapat ulum Cairo Universitas (al-Jami"ah al-Qahirah)* dan lulus pada tahun 1939.

Setelah menamatkan kuliahnnya di universitas al-Azhar dan universitas Darul Ulum, beliau kembali kealamateranya, al-Khairiyah dan mngajar pada tingkat Tsanawiyah dan mualimin pada tahun 1940.selang beberapa tahun kemudian, Syadeli hasan menjadi guru HIK Muhammadiyah Solo 1941-1943). Kemudian di angkat menjadi pengajar di sekolah tinggi Islam (UII) Yogyakarta (1945-1946), ADIA Jakarta (1960-1963), dekan Fakutas Syari"ah di IAIN Serang (1962-1979). Pada tahun 1979 beliau di angkat menjadi guru besar di Fakultas

Syari"ah di IAIN Sunan Gunung Djati di Srang.Beliau pula tercatat sebagai anggota pendiri UII, UNISBA dan SMAN 1 Serang.

Ketika revolusi kemerdekaan , beliau lmemilih aktif sebagai tentara pelajar yang turt berjuang mempertahankan kemerdekaan. Paska kemerdekaan (1945-1959), sebagai pengejawantahan dari idealismnya di dunia politik, ia terjun menjadi anggota KNPI, wakil Ketua Badan Eksekutif Keresidenan Banten anggota dewan pemerintah daerah sementara (DPDS) JABAR, anggota dewan Keamanan Pertahanan Daerah Banten dan Konstituante (panitia Persiapan Konsitusi).

Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya di Kairo tahun 1939, MSH menjadi guru HIK Muhammadiyah Solo (1941-1943) dan kemudian di angkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Islam (UII) Yogyajkarta (1945-1946), di ADIA Jakarta (1960-1963), dekan Fakultas Syaria"ah IAIN Serang (1962-1978). Tahun 1979, ia di angkat menjadi Guru Bear di Fakultas Syari"ah IAIN Sunan Gunung Djati di Serang.

Di wilayah sosial kemasyarakatan, MSH di kenal sangat aktiv dan penuh pengabdian. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai ketua PB pengurus Islam Alkhairiyyah (1962-1980) berkeliling Banten, DKI, Jakarta, Lampung, Sum-Sel< Jmabi

MSH tercatat sebagai anggota Dewa Kurator UNISBA, Akademi Ilmu Al-Qur"an serang, dan menjadi ketua MUIdaerah Banten, ia juga di laporkan turut menjadi anggota badan pendiri UII, UNISBA dan SMAN 1 Serang. PMI dan Pramuka juga dua medan yang pernah digelutinya denganduduk ,asing-masing sebagai pengurus dan anggota Majlis Pembimbing. Di kalangan para guru yang tergabung dalam PGRI Kab.Serang, MSH dikenal sebagai seorang anggota Dewan Penasehat (1976-1979).

Syibbromalisi adalah murid K.H Syam"un yang berjasa besar dalam mempertahankan dan mengembangkan madrasah al-Khairiyah. Lahir pada tahun 1908 dari keluarga sederhana.Ia adalah putra dari Ki Awi dan Nyi Rasmi yang tinggal di kp. Kelelet desa Warnasari Cilegon.Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Adik-adiknya bernama H. Halimi dan Misbach.

Pendidikan dasarnya di tempuh di kampong halamannyanKelelet. Kemudian menginjak usia remaja, ia melanjutkan pendidikannya di madrasah al-Khaitiyah dan lulus pada tahun 1937. Syibromalisi di kenal sangat menguasai ilmu-ilmu tata bahasa arab dan ilmu arudh.

Di dalam struktur kepengurusan perguruan islam al-Khairiyah Syibromalisi di percaya untuk mengurus maslah

pendidikan. Baik kepengurusan di bawah Masriya Qasid Wasekh pada tahun 1943, maupun masa kepengurusan Syadeli Hasan pada tahun 1955, Syibromalisi selalu menjabat sebagai ketua seksi pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan putranya yang ke-7, Muhammad Amin Syibromalisi, bahwa ayahnya tersebut bersifat sangat penyabar, sehingga kendatipun ada konflik internal di pengurusa madrasah tidak sampai menjadi runcing dan tumbuh perpecah.Beliau juga telah di ketahui telah hafal sl-Qur"an 30 juz.Tambah pula, selain ia menghasilkan karya berbahsa arab, ia juga sering mengubah lagu-lagu yang berisi pujian-pujian kepada rosullulah yang kemudian selalu di nyanyikan oleh para murid al-Khairiyah ketika sebekum atau sesudah belajar mengajar di kelas ketika ada acara-acara peringatan hari-hari besar Islam.

Ketika masa-masa revolusi kemerdekaan, banyak guru-guru al-Khairiyah yang menjadi pejabat pemerintah menjadi camat atau wedana di wilayah keresidenan Banten.Syibromalisi, konon telah diberi amanat oleh K.H Syamu"un.untuk tidak ikut mengangkat senjata dan diminta untuk focus saja mengelola pendidikan al-Kahiriyah.

Syibromalisi Awi wafat di Citangkil pada 24 Februari 1968 dalam usia 60 tahun. Ia di karuniai 12 anak dari hasil

pernikahannya dengan KH. Sufro dari Kubangsawit.Berturut-turut mereka adalah anak perempuan (menginggal ketika masih kecil), K.H. Ahmad Syadeli, Drs. K.H M. alisuf Sobri, K.H. Lettu (purnawirawan). Ahmad Suwidi, H. Ahmad Tahrir, Drs. K.H. Sa"adun Syibromalisi, K.H. M. AminSyibrolmalisi, LML, Ubaidillah Syibromalisi, Dra. Hj. Badi"ah Syibromalisi, Eti Fatimah, M. Muhdi dan Abdul Muis Syibromalisi.Sebelum pernikahan dengan Hj. Sufro ini, Syibromalisi juga pernah menikah dengan Khodijah atau Kapol dari Jombang Cemara dan Hj. Faujiah dari kerenceng.Akan tetapi dari kedua pernikahan ini, Syibromalisi tidak emperoleh keturunan.

Salah satu karyanya yang sangat monumental adalah *majmu"at al-anashid li syubban al-muslimin*. Kumpulan syair **ii** ditulis dalam bahasa Arab dan menjadi semacam nilai identitas kader untuk santri Alkhairiah.Syair ini berisi nasehat dan bimbingan moral kepada para santri Alkhairiah dalam menuntut ilmu. Dalam beberapa bait syair ini juga ditegaskan tentang pentingnya memiliki jiwa patriotic, pengorbanan untuk membela tanah air.

Karnyanya yang sangat mengagumkan apa bila di ingat bahwa ia bukan lulusan timur tengah, adalah sebuah kitab kumpulan syair yang berjudul *Majmu"at al-Anasyid al-Muqarara bi „I-madrasa al-Khairiyah Lijam"iyyat Nahdt al-Subban al-Muslim.*

Kitab ini terdiri 30 bait syair yang menggugah para warga al-Khairiyah untuk tidak hanya di motivasi untuk mengusai ilmu-ilmu dan mengajar islam yang setinggi-tingginya, tetapi juga bagaimana dengan ilmu tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Syair-syair ini juga mengasah kepedulian para kadernya terhadap anak yatim, golongan miskin dan kaum yang tidak beruntung.Tidak kurang pentinggnya, syair-syair ini menyulut para kadernya untuk cinta tanah air dan mengorobarkan semangat patriotism yang tinggi.

Abdul Aziz adalah adalah mantan Camat Cilegon yang sangat peduli terhadap keturunan K.H Wasyid dan perkembangan al-Khairiyah. Namun asli tokoh ini adalah Kartawirana Bin Sarim. Beliau adalah putra seorang ambetenaar belanda..oleh karena itu, di mata umumnya masyarakat waktu itu, Kaartawirana adalah adalah keturunan priyai yang secara sosial lebih disegani dan cukup berpengaruh. Namanya berubah setelah bergabung K.H Syam"un untuk berujung berjuang dalam bidang pendidikan menjadi K.H Abdul Aziz Kartawirana.

Ketika Kolonial Belanda melarang keturunan K.H. Wasyid untuk pulang ke kampung halamannya, Cilegon, Abdul Aziz yang berusaha membujuk Gubernur Jendral dan penasehat Urusan Pribumi saat itu masing-masing dijabat

Graaf Van Linbrugh stirum dan Gobee serta berani memberikan jaminan untuk tidak memberontak.Seperti tercatat dalam sejarah bahwa anak turunannya K.H Wayid tidak dibiarkan begitu saja gera-gerik leluasa melangkah.Pemerintah Kolonial Belanda selalu saja mengawasinya dengan ketat. Bahkan ketika K.H Syam"un mendirikan madrasah al-Khairiyah Pemerintah Konlonial Blanda secara khusus mengutus Van der Plas untuk mengawasinya. Tidak berhenti sampai situ, pada masa Pemerintah Jepang mengutus tuan Hasan untuk memata-matai dan melaporkan setiap yang dilakukan K.H. Syam"un. Dukungan Abdul Aziz terhadap K.H Syamu"un tidak hanya berupa jaminan nyawanya yang di pertaruhkan agar K.H Syam"un diizinkan pulang ke kampung halamnnya.Akan tetapi beliau secara aktif ikut mendirikan madrasah al-Khairiyah pada tanggal 5 Mei 1925.

Seperti diceritakan Putra K.H Syam"un, KH Rahmatullah, bahwa K.H Syam"un tidak mampu baca-tulis huruf Latin.Akan tetapi madrasah al-Khairiyah sejak pendirian telah di masukan ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulumnnya. Oleh karena itu di perlukan orang lain yang telah mapu baca tulis latin yang telah melek organisasi modern. Orang tersebut tidak lain adalah kartawirawan yang kemudian di kenal dengan

K.h Abdul Aziz Kartawirawan. Lebih jauh lagi, Abdul Aziz Kartawirawan memplopori Pendirian Koprasi Boempoetra yang mendapat pengesahan resmi dari Pemerintah Belanda pada tanggal 20 Juni 1928 bertepatan dengan tanggal 8 Muharam tahun 1347 Hijriyah.

Di dalam satuten Kooperatie Oesaha Boemi poetra Tjitangkil tercantum para pengurus (Lid Bestuur koprasi sebagai berkut: K.H Abdul Aziz sebagai presiden, K.H. Abdurrachim (sekertaris), K.H. Syam"un (Bendahara), KH Kasiman (anggota), K.H Aliuddin (anggota), K.H Safidudin (anggota) dan K.H. Sariman (anggota). Pengurus ini mempunyai masa kerja selama 25 tahun sejak tanggal disahkan. Dengan demikian, berdirinya al-Khaairiyah dengan digunakan system pendidikan modern dan masuknnya ilmu-ilmu umum dalam kurukulumnnya semata-mata bukanlah sekedar karya K.H. Syamu"un, melainkan hasil kerjasama dengan K.H. Abdul Aziz yang melek terhadap ilmu-ilmu umum dan sudah mengenal organisasi modern.

Al-Khairiyah telah berkontribusi terhadap masyarakat luas. Di masa-masa kemerdekaan Indonesia, di dalamnya Banten, tengah membutuhkan kelompok cendikia muda yang progresif dengan semangat heroic yang tinggi. Al-Khairiyah telah berhasil memenuhi kebutuhan tersebut.

BAB III

K.H. ABDUL FATAH HASAN, SANTRI AL KHAIRIYAH YANG BELAJAR KE AL AZHAR (1924-1939)

A. K.H. Abdul Fatah Hasan, Santri Dari Beji (1912-1924)

Sejarah sosial di Banten mencatat Beji sebagai satu wilayah kecil di sudut Banten yang melahirkan banyak simbol-simbol heroisme. Tidak ada yang mengira Ki Wasid salah satu tokoh perlawanan petani, menurut versi Sartono, terhadap pemerintah kolonial Belanda lahir di Beji. K.H. Syam"un seorang tokoh ulama modernis yang gugur sebagai kusuma bangsa dan pelopor pergerakan nasionalis terpenting di Banten, juga lahir dari rahim Beji.

Pada bulan Juli 1912 Beji melahirkan satu orang lain tokoh sejarah Banten pasca kemerdekaan. Seorang murid kiayi yang berjiwa herois dan nasionalis, K.H. Syam"un. Ia adalah K.H. Abdul Fatah Hasan. Ayahnya seorang haji bernama Haji Hasan di Beji Bojonegara dan ibunya hajah Zainab (www.bantennews.com/Jum"at, 17 Agusus 2018). Haji Hasan memiliki tiga orang saudara kandung mereka adalah Syadeli Hasan, Abdul Qahar, dan Hadijah. K.H. Abdul Fatah Hasan

adalah anak pertama dari haji Hasan dan hajah Zaenab (Syibli Sarjaya, dkk, 2014: 35).

Pendidikan dasarnya di Beji ayahnya mengirimnya mesantren di al-Khairiyah sekitar tahun 1924-an bersama adiknya K.H. Syadeli Hasan yang menyusulnya pada tahun 1926 (Syibli Sarjaya, dkk., 2014: 39). Catatan yang disusun oleh Syibli Sarjaya dan kawan-kawan tampaknya merujuk pada rekaman memori sumber-sumbernya. Jika kita menghubungkan dengan perkembangan pesantren al-Khairiyah, tahun 1924 adalah waktu dimana K.H. Syam"un melaksanakan ibadah haji dan oleh karena itu pesantren Citangkil sementara waktu ditutup. Tahun 1925 baru dibuka kembali dalam bentuk yang sudah mengalami transformasi, berdirinya madrasah al-Khairiyah (Mufti Ali, dkk. 2018: 18). Bisa dipastikan K.H. Abdul Fatah Hasan termasuk murid-murid K.H. Syam"un pertama di al-Khairiyah.

Selama belajar di al-Khairiyah K.H. Abdul Fatah Hasan termasuk murid K.H. Syam"un yang istimewa (Syibli Sarjaya, 2014: 39). Dengan kecerdasan dan ketekunan yang lebih dari siswa lainnya membuat K.H. Syam"un memberi perhatian khusus, di kemudian hari K.H. Abdul Fatah Hasan menjadi seorang kadernya yang memiliki prestasi akademik yang tinggi dan berhasil berkiprah di tingkat nasional.

K.H. Syam"un sendiri banyak melakukan usaha percepatan dalam membangun dan mengembangkan al-Khairiyah. Dalam rentang tahun 1925-1940 al-Khairiyah tumbuh dengan begitu cepat dan dinamis. Dari mulai Koperasi Boemi Poetra yang berdiri tahun 1925-1928, sebagai lembaga usaha yang dirintis al-Khairiyah untuk menopang perekonomian. Tahun 1931 K.H. Syam"un mendirikan Jam"iyat Nahdhatu Syubbanil Muslimin, sebuah organisasi kepemudaan yang menjadi wadah pendidikan organisasi dan sarana pergerakan sosial bagi al-Khairiyah sendiri dalam usaha mendorong kesadaran nasionalisme di kalangan anak-anak muda di Cilegon (Mufti Ali, dkk, 2018: 19-20).

Organisasi pergerakan bentukan al-Khairiyah ini telah bergerak optimal dan memberi dampak yang signifikan kepada pertumbuhan al-Khairiyah. Sampai tahun 1933 al-Khairiyah sudah memiliki cabang 15 madrasah di berbagai daerah di Banten. Organisasi ini pula yang berpikir dan mengusahakan pengkaderan para alumni al-Khairiyah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang mampu mengelola madrasah-madrasah al-Khairiyah (Mufti Ali, 2018: 22).

Usaha terpenting yang dilakukan al-Khairiyah dalam mempersiapkan kader-kadernya adalah mengutus para alumninya ke Universitas al-Azhar Kairo. K.H. Syam"un sendiri

adalah alumni al-Azhar yang menyaksikan laju pembaruan pendidikan Islam di Mesir begitu kuat. Mesir sendiri di tahun-tahun itu tengah menyaksikan pergerakan sosial masyarakat Mesir di bawah kepemimpinan para cendikiawan yang progresif, modernis dan tentu saja memiliki kesadaran nasionalis yang kuat. K.H. Syam"un berharap para alumninya dapat belajar banyak dari gerak sejarah di Mesir. K.H. Abdul Fatah Hasan bersama adiknya K.H. Syadeli Hasan pun dikirim ke al-Azhar untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi.

B. Orang Banten Belajar ke Luar Negeri

Tradisi belajar ke luar negeri memiliki catatan panjang di tengah masyarkat Banten. Tentu saja mayoritas pelajar memilih belajar ke Timur Tengah. Kecuali setelah memasuki masa kolonialisme dan sekolah-sekolah Belanda sudah tersebar luas di Banten. Beberapa alumni sekolah Belanda tercatat ada yang melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi di Belanda. Pemerintah kolonial Belanda pada saat yang sama menyadari perlu membuka jalur baru bagi penduduk pribumi untuk mendapat tenaga professional yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah Belanda terhadap penduduk pribumi. Oleh karena itu, mereka

pun membuka akses begi pribumi belajar di negeri Belanda, tentu saja orang-orang tertentu saja yang dapat menikmatinya.

Snouck Hugronje adalah seorang doctor yang menyelesaikan penelitian desertasinya di Mekah pada tahun 1885-1886 telah banyak memberi nasihat-nasihatnya terhadap pemerintah Belanda di Indonesia untuk urusan kebijakan-kebijakan publik menyangkut hal ihwal pribumi. Sebagai seorang intelektual kenamaan di Belanda, ia cukup konsern terhadap kepentingan-kepentingan pribumi dalam menerima pendidikan modern yang maju. Kontribusinya terhadap pembentukan kelompok cendikia muda di Indonesia sangat besar. Hampir di setiap daerah yang dikunjunginya selama perjalnan karirnya di Indonesia. Ia banyak memberi rekomendasi kepada pelajar-pelajar Indonesia untuk mendapat pendidikan tinggi di Belanda. Salah satu contoh penting di Banten adalah keluarga Jayadiningrat.

Anak-anak Jayadiningrat berhasil mengenyam pendidikan belanda sampai tingkat tinggi dan mampu berprestasi dengan baik selama belajar di Indonesia hingga Belanda dan kiprahnya di Indonesia. Perkenalannya dengan keluarga Djajadiningrat dimulai dari persahabatannya dengan Abu Bakar Djajadiningrat seorang adik dari Raden Bagoes Djajawinata. Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat di dalam

Meoar-nya menyatakan pengakuannya "Seluruh keluargaku berhutang budi kepadanya. Ia telah mempengaruhi alam pikiran dan cita-citaku sampai akhir kerjaku. Seluruh petunjuk dan nasihatnya telah kuperhatikan dan kuhargai."(P.A. A. Djajdiningrat, 1996: 74; Mufti Ali, 2015: 185).

Tahun 1890 – seperti dikisahkan P.A. Ahmad Djajadiningrat – mendapat anak asuh untuk pertama kalinya. Tentu saja anak itu adalah Achmad Djajadiningrat itu sendiri yang mendapat pendidikan langsung dari Snouck Hugronje. Ia juga yang menjembatani Muhamad Djajadiningrat, Hasan Djajadiningrat dan Hosein Djajadiningrat serta Maria Ulfah Djajadiningrat adalah sejumlah anak dari klan Djajadiningrat yang memiliki prestasi gemilang jebolan sekolah-sekolah Belanda (Mufti Ali, 2015: 188).

Di antara hasil penelitian Snouck Hugronje adalah laporan aktifitas para mukimin haji asal Nusantara, khususnya Banten selama tinggal di Mekkah. Abad 19 hingga awal abad 20 dapat disebut sebagai masa pertumbuhan jaringan keulamaan Banten yang signifikan. Di antara ulama Banten yang belajar di Mekah yang layak disebut di sini adalaha Syekh Muhamad al-Nawawi al-Bantani dan Syekh Sama"un bin Ta"syiq. Meski yang kedua tidak bermukim di Mekah seperti al-Nawawi. Syekh Samaun dan Syekh Nawawi pernah belajar

bersama kepada Syekh Sayid Dahlan di Mekah. Ulama-ulama kenamaan ini pun mendapat perhatian besar dari Snouck Hugronje sebagaimana dilaporkannya di dalam buku *The Mekka in the Letter Part of The 19th* (1931). Snouck Hugronje berhutang budi kepada tiga orang Nusantara terpelajar yang bekerja di Konjen Hindia Belanda untuk Jedah, Hasan Mustafa, Tengkue Noerdien dan Abu Bakar Djajadiningrat (Mufti Ali, 2015: 185).

Meningkatnya angka mukimin haji asal Nusantara di Mekah didorong oleh kemajuan teknologi transportasi yang diimpor pemerintah Belanda ke Hindia Belanda dan kebijakan-kebijakannya di bidang penyelenggaraan ibadah haji. Martin van Bruinessen mencatat sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869 mukimin haji dari Jawa meningkat pesat. Maskapai Inggris dan Belanda bersaing ketat untuk mendapat penumpang haji terbanyak dari daerah ini Jawa atau Singapura. Meski pun pemerintah Hindia Belanda mengkawatirkan keadaan tersebut, kepentingan politik mereka pun harus mengalah kepada keuntungan ekonomi yang didapatnya dari kenaikan jumlah jama"ah haji (Martin van Bruinessen, 7).

Memasuki abad 20, tradisi belajar ke Timur Tengah mulai mengalami perkembangan, tidak hanya berorientasi ke Makah-Madinah tapi Mesir. Mesir menjadi pusat perhatian

para pelajar Indonesia dan banyak menarik minat para pelajar untuk belajar di Universitas al-Azhar. Menurut Yudhi Latif, Jamaludin al-Afghani memberi angin segar bagi perkembangan Al-Azhar. Perubahan orientasi yang terjadi pada para pelajar muslim Indonesia dari Mekah ke Mesir, salah satunya karena daya tarik pemikiran-pemikiran reformisme Jamaludin al-Afghani yang dipercaya akan bermanfaat bagi kemajuan bangsa (Yudhi Latif, 2004: 106). Semua akses yang dimiliki para pelajar Banten untuk belajar ke Timur Tengah, baik Makah-Madinah atau Kairo, diperoleh melalui jaringan personal para haji.

Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Ismail Abdul Muthalib adalah dua tokoh ulama Nusantara yang bermukim dan menjadi guru terpenting setelah al-Nawawi dan Zaini Dahlan yang menjadi simpul perkembangan terbaru di akhir abad 19 ini. Setelah meninggalnya Syekh Nawawi dan Syekh Zaini Dahlan jalur belajar para pelajar Indonesia mulai beralih ke Mesir. Peralihan jalur belajar dari Mekah ke Kairo berlangsung mengikuti jejak Syekh Ismail Abdul Muthalib, seorang guru berasal dari Padang yang tiba di Mesir tahun 1894-1895 (M. S. Putuhena, 2007: 326). Sementara Syekh Ahmad Khatib pengganti al-Nawawi lebih terbuka terhadap arus baru pemikiran Islam. Setidaknya ia membiarkan murid-muridnya

berkenalan dengan pemikiran pembaruan Islam khususnya gagasan Muhamad Abduh (Jajat Burhanudin, 2004: 181).

Dua kondisi tersebut mendorong terjadinya eksodus pelajar Indonesia ke Kairo dengan angka yang cukup besar dan terus mengalami pertambahan tiap tahunnya, kondisi tersebut akan menentukan perkembangan paradigma keagamaan Indonesia di kemudian hari. Menurt Martin van Bruinessen, hampir tidak ada informasi yang akurat menyebutkan jumlah pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir sebelum abad 20. Kecuali setelah memasuki pertengahan abad 19. Pada pertengahan akhir abad 19 tercatat ada 30 *riwaq* di kompleks al-Azhar yang dihuni oleh pelajar dan mahasiswa berasal dari berbagai negara: Jawa, Turki, Kurdi, dan Arab Iraq (Martin van Bruinessen, 1994: 144).

Pertumbuhan komunitas *Jawah* yang cukup signifikan sebenarnya terjadi setelah tahun 1912. Tahun 1900-an kondisi *riwaq Jawah* yang menampung mahasiswa Indonesia di Universitas al-Azhar sudah tidak lagi bisa menampung mahasiswa baru dari Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun 1912 para penghuni *riwaq* mendirikan asosiasi khusus penghuni *riwaq*, Jama"ah Setia Pelajar (JSP). JSP mengusahakan pengembangan riwaq agar bisa menampung mahasiswa baru dari Indonesia (Burhanudin, 2004: 183).

Berdasarkan catatan Kon. Jen. Belanda di Kairo dalam lampiran E dari *Bedeverslag* 1914/1915 yang termuat dalam lampiran IV dari buku *Historiografi Haji Indonesia* karya M. Saleh Putuhena, disebut-sebut ada 37 orang mahasiswa Indonesia yang tiba di Mesir untuk menuntut ilmu di Universitas al-Azhar. Sebagian besar dari mereka ada yang sudah tinggal satu tahun di Mekah, dan ada juga yang sudah tinggal delapan tahun dengan usia yang pariatif. Usia termuda 15 tahun dan tertua 44 tahun. Mereka semua berasal dari berbagai daerah di Nusantara: Sambas (11 orang), Sumatra Utara (6 orang), Pandeglang (4 orang), Palembang (2 orang), Padang (2 orang), Martapura (1 orang), Batavia (1 orang), Banten (1 orang), Serang (1 orang), Kendal (1 orang), Pekalongan (1 orang), Lampung (1 orang) dan Bengkulu (1 orang). Jumlah tersebut semakin bertambah banyak setelah tahun 1912. Di antara mahasiswa asal Pandeglang yang perlu disebutkan adalah Hadji Inoeng Sama Boa, Hadji Mohamad Noer Labuan, dan Mohamad Oemar Pandeglang (Putuhena, 2007: 362-363).

Catatan ini menandakan periode awal orang-orang Banten yang belajar ke al-Azhar setelah wafatnya Syekh Nawawi Tanara. Pada saat yang bersamaan Kairo tengah bergeliat untuk menjadi sentral studi Islam dunia yang bergaya modern. Sistem

yang diterapkan al-Azhar tidak sama dengan tradisi Mekah yang kebanyakan para gurunya mengajarkan kitab di Masjid al-Haram dan rumah-rumah mereka pribadi, meski pun di sana telah berdiri juga Madrasah Showlatiyah yang dibangun untuk melayani kebutuhan pendidikan madrasah bagi orang-orang India. Karena madrasah ini bersifat eksklusif untuk orang-orang India, maka jarang sekali orang Indonesia yang belajar di Showlatiyah, mereka lebih tertarik untuk privat dengan para syekh di Masjid al Haram.

Al-Azhar sendiri telah mengalami usaha modernisasi di tahun 1908 dengan menerapkan sistem klasikal. Semula pengajaran di al Azhar sama dengan di Masjid al Haram, pengajaran dilakukan di masjid dengan tanpa ada sistem berjenjang. Sejak tahun 1908 itu al Azhar menerapkan tiga jenjang pendidikan: pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dan terus dilakukan pemantapan dalam beberapa periode; pada tahun 1911 al-Azhar mengembangkan durasi 5 tahunan untuk semua jenjang. Dan tahun 1930 disempurnakan lagi menjadi pendidikan dasar 4 tahun; menengah 5 tahun; dan pendidikan tinggi 4 tahun, kecuali pendidikan tinggi keterampilan yang menghabiskan waktu 5 tahun. Sejak tahun 1930 al-Azhar telah membuka tiga fakultas utama: usuludin, syari"ah dan bahasa Arab (Abudin

Nata, [ed], 2013: 193). Perubahan-perubahan signifikan di al Azhar ini telah menarik perhatian dan minat para santri dari Indonesia bahkan Banten pun ikut mengirimkan santri-santrinya ke al-Azhar.

Setelah periode Haji Inoeng santri Banten yang pertama belajar di al-Azhar, orang-orang Banten berduyun-duyun belajar ke al Azhar. Salah satu lembaga pendidikan yang tampaknya aktif mengirimkan kader-kadernya ke al Azhar adalah al Khairiyah Citagkil Cilegon.

C. Kaderisasi Santri al-Khairiyah ke al-Azhar Kairo (1924-1933)

Hampir tidak ada catatan resmi yang menggambarkan proses awal pengiriman alumni al Khairiyah ke al-Azhar. Yang dapat dipastikan hanyalah bahwa al Khairiyah mengirim alumninya ke al-Azhar untuk pertama kalinya di tahun 1933. Ada dua orang santri terbaiknya yang belajar di al Azhar yaitu Muhamad Syadeli Hasan dan Abdul Fatah Hasan, K.H. Syam"un sendiri yang langsung mengantar keduanya(Mufti Ali, dkk, 2014: 97).

Masa-masa itu pengaruh Abduhisme di al-Azhar masih sangat kuat. Al-Azhara ketika K.H. Abdul Fatah Hasan belajar di al-Azhar dipimpin oleh Syekh Muhamad al-Ahmadi Az-

Zawahiri (1929-1935). Ia adalah alumni al-Azhar yang sangat mengagumi Muhamad Abduh dan mendukung serta ikut mengembangkan gagasan pembaruan Abduhisme, gagasan-gagasannya sangat jelas ia ungkapkan di dalam karyanya *Al-'Ilm Wa Al-'Ulama Wa Al-Nizam Al-Ta'lim* (1904). Sebuah karya yang melontarkan kritik pedas kepada kalangan konservatif di kalangan al-Azhar. Di antara kritik pedasnya ditujukan kepada prosedur penerimaan pelajar di al-Azhar. Selama beberapa tahun sebelum 1930-an para pelajar dari luar yang tiba ke al-Azhar meyoritas berasal dari kalangan petani dan beberapa lagi belum memiliki pendidikan yang baik. Sementara al-Azhar tidak bisa menerima mereka langsung kecuali setelah menyelesaikan pendidikan di halaqah-halaqah di masjid al-Azhar. Sayangnya kegiatan pembelajaran di halaqoh itu tidak mendapat perhatian serius dari pihak al-Azhar, hasilnya banyak siswa yang terjerumus ke dalam lingkungan yang rusak, peminum al-kohol dan pencabulan. Oleh karenanya Syekh al-Azhar perlu meninjau kembali sistem penerimaan siswa baru di al-Azhar dan mengawasi aktifitas seluruh siswa di halaqoh-halaqoh (Indira Falk Gesink, 2010: 206-207).

Untuk kedua kalinya al Khairiyah mengirim alumninya di tahun 1956. Ada empat orang alumni yang dikirim al Khairiyah belajar di al Azhar, mereka adalah Rahmatullah

Syam"un, Qurtubi Janah, Abdul Wahhab Afif dan Sufi Muslim (Mufti Ali, dkk, 2014: 97).

Al Khairiyah kembali mengutus alumninya ke al Azhar untuk ketiga kalinya di tahun 1960. Mereka adalah Fathullah Syam"un, Syamhudi Abduh, dan Muhamad Saju Razak. Empat belas tahun kemudian di tahun 1974, al-Khairiyah kembali mengirim alumninya ke al-Azhar melalui Akademi Ilmu al Quran, mereka adalah Rahimi Misja dan Mahfud Adra"i. Dan al Khairiyah terus mengutus alumninya ke al Azhar sampai tahun-tahun berikutnya hingga tahun 1982. Tahun 1981, al Khairiyah tidak saja mengutus alumni ke Mesir tapi juga ke Iraq, Udi Mufrodi adalah salah satu alumni yang dikirim ke Iraq (Mufti Ali, dkk, 2014: 98).

Tahun 1931 berdasarkan analisa Mahmud Yunus merupakan masa awal yang menandakan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum tahun-tahun itu, pengaruh sistem pendidikan Mekah masih begitu kuat. Akan tetapi dunia pendidikan Islam Indonesia rupanya mulai bergeser tertarik pada kemajuan pendidikan di Mesir (Abudin Nata, [ed.], 2013: 196-197). KMI Padang disebut-sebut lembaga pendidikan Islam yang pertama kali melakukan pembaruan berdasarkan blue-print al-Azhar, kemudian diikuti Gontor oleh K.H. Imam Zarkasyi. Untuk kasus di Banten, al-Khairiyah

termasuk lembaga pendidikan Islam yang menerima pengaruh al-Azhar Mesir setelah kader-kadernya mendapat pendidikan di Kairo.

Tokoh-tokoh al Khairiyah ini di kemudian hari banyak mewarnai almamaternya dengan mengajar kembali di al Khairiyah. Sehingga adalah wajar jika kemudian al Khairiyah dikenal dengan sebutan al-Azhar di Banten. Tidak saja para pengajarnya lulusan al Azhar mereka justru banyak mengembangkan apa yang mereka dapat di al Azhar untuk kepentingan pengembangan al-Khairiyah. Para alumni al-Azhar ini kemudian menerapkan sistem pendidikan yang berkembang di Mesir, terutama al-Azhar.

D. Mengenal Dunia Pergerakan Nasional di Mesir (1933-1939)

Pergolakan politik di Mekah, perebutan kekuasaan antara Ibnu Sa"ud dan Syarif Husein, telah membuat para pelajar muslim asal Indonesia meninggalkan Mekah. Mesir – pada saat yang sama – tengah mengalami kemajuan. Al-Azhar telah menjadi pusat modernisasi pemikiran Islam yang progresif di bawah pengaruh Muhamad Abduh. Banyak pelajar muslim asal Indonesia umumnya asal Asia Tenggara, berharap dapat belajar agama sekaligus belajar berpolitik. Perlu kita

tegaskan bahwa para pelajar asal Indonesia termasuk beberapa wilayah di Asia Tenggara, hanya kelompok kecil saja di antara mereka yang terlibat di dalam kegiatan politik. Keterlibatan mereka di kancah politik pergerakan di Mesir telah ikut membentuk kesadaran berpolitik mereka ketika kembali ke tanah air. Setidaknya ada tiga perkumpulan politik yang menjadi wadah kegiatan politik mereka di Mesir *Partai Wafd*, *Misr al-Fatat* dan *Ikhwan al-Muslimin* (Abu Hanifah Haris dan Mohamad Redzuan Ottman, Juni, 2015: 15).

Tahun 1926 adalah tahun yang fital bagi peran Mesir memobilisasi negara-negara Islam atau lebih tepatnya umat Islam dunia. Mesir mengorganisasi sebuah konfrensi Islam tingkat internasional dengan maksud mengusahakan berdirinya kembali kedaulatan dunia Islam, *Khilafah Islamiyah*. Pemerintah Hindia Belanda menyadari bahayanya kongres tersebut bagi kedudukan mereka. Oleh karenanya melakukan pengawasan ketat terhadap perkumpulan pergerakan dan politik Islam di Indonesia. Mereka mengeluarkan larangan keras bagi perkumpulan-perkumpulan umat muslim di Indonesia mengutus perwakilannya ke Mesir. Namun rupanya larangan tersebut tidak menghalangi mereka mengikuti kongres tersebut. Berdasarkan keterangan Abu Hanifah Haris dan Muhamad Redzuan Ottman setidaknya ada 40 buah

perkumpulan asal Indonesia yang menghadiri kongres tersebut. Salah satunya Serikat Islam, H.O.S. Cokroaminoto dan Haji Mansur terlihat aktif dalam kongres tersebut. Kongres Islam internasional itu telah menghasilkan rekomendasi yang menguntungkan bagi umat Islam Indonesia di antaranya adalah urusan pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Melayu, pembentukan perhimpunan Indonesia Timur yang dipusatkan di Surabaya dengan dana sebesar £9000 (Abu Hanifah Haris dan Mohamad Redzuan Ottman, Juni, 2015: 15).

Kongres internasional tersebut memberi dampak signifikan bagi tumbuhnya kesadaran nasionalisme di kalangan pelajar yang berasal dari Asia Tenggara. Tulisan-tulisan yang mencirikan semangat baru terbit di *Seruan Azhar* dan *Pilehan Timoer.* Dua jurnal bulanan yang diterbitkan oleh para pelajar asal Asia Tenggara tersebut menyuarakan semangat kemerdekaan dan kebebasan. Kemudian kesadaran tersebut dimanifestasikan ke dalam sebuah perkumpulan pelajar al-Azhar yang berasal dari Asia Tenggara, *Jam'iyat al-Khairiyah d Thalabiiyah al-Azhar al-Jawah* (Abu Hanifah Haris dan Mohamad Redzuan Ottman, Juni, 2015: 15; William R. Roff, tth: 73). Tokoh-tokoh seperti Mahmud Yunus, Kahar Muzakar, Mukhtar Luthfi seorang cucu dari Daud Rasyidi – seorang

pembaru di Minangkabau, mereka adalah tokoh-tokoh pelajar asal Asia Tenggara, khususnya Sumatra dan Jawa, yang kembali ke tanah airnya sebagai aktivis politik yang memperjuangkan kemerdekaan (William R. Roff, tth: 78).

William Roff menyebut jurnal *Seruan al-Azhar* menjadi media yang fital dalam mengkomunikasikan perjuangan *Jami"ah Chairiyah*. Melalui jurnal ini pula organisasi yang dibangun para pelajar Asia Tenggara di Mesir telah membuka pintu kerja sama dengan berbagai perkumpulan Indonesia di mana pun (William R. Roff, tth: 79). Pada saat yang sama pula pelajar-pelajar Indonesia yang bersekolah di Belanda tengah mengembangkan semangat yang sama melalui organisasi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang serupa dengan Jami"ah Chairiyah, sebuah organisasi pelajar Indonesia yang berdiri di Belanda, Muhamad Hatta pernah menjabat ketua umum organisasi ini. Perhimpunan Indonesia meski awalnya ia merupakan organisasi sosial-budaya, di tangan Muhamad Hatta organisasi ini berkembang menjadi lebih bersifat politis. Kemudian Perhimpunan Indonesia mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia dan menjalin kerja sama dengan berbagai negara asing agar mereka memahami kondisi Indonesia sebenarnya dan mendapat dukungan dari negara-negara asing (Atiqah dan

Sardiman). Oleh sebab itu Hatta mempropagandakan kemerdekaan Indonesia ke berbagai negara, ia berpendapat "Dunia luar sampai sekarang tidak tahu tentang apa yang terjadi di tanah air kita, sebagai konsekuensinya secara keliru dipercayai bahwa Indonesia benar-benar mendapat berkah pemerintah Belanda" (Wildan Sena Utama, 2015: 30).

Strategi yang disepakati oleh para pemimpin PI dalam memperluas propaganda gerakan kemerdekaan Indonesia adalah membangun jaringan dengan gerakan antikolonial Asia dan Afrika, terutama yang berada di Eropa. Di samping itu, pengurus PI juga menjaga hubungan dengan organisasi mahasiswa Indonesia dan Malaysia di Kairo (Wildan Sena Utama, 2015: 31). Tentu saja para pelajar yang bergabung di Persatuan Indonesia di Belanda menangkap adanya semangat yang sama dari para pelajar asal Indonesia di al-Azhar yang tergabung dalam *Jami"at al-Khairiyah*, tentu saja dengan jumlah mereka yang lebih besar, melalui *Seruan al-Azhar* yang memuat banyak tulisan yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Seperti disebut oleh William Roff, jurnal bulanan ini telah berfungsi dengan benar menghubungkan pergerakan mahasiswa di Jami"ah Khairiyah dengan berbagai perkumpulan pelajar di berbagai negara, khususnya Perhimpunan Indonesia di Belanda. Bahkan Raden Fathul Rahman, seorang pelajar

asal Jawa, ketua Jami"ah Khairiyah dan Direktur Seruan al-Azhar, menulis dalam jurnalnya yang terbit bulan Oktober 1926, Jami"ah telah menjalin hubungan dengan Peninsula. Secara singkat, kata Raden Fathul Rahman, Jami"ah al-Khairiyah dengan demikian telah menjadi bagian dalam pergaulan dunia Islam (William Roff, tth: 79).

Dalam situasi yang begitu menggairahkan bagi para aktivis asal Indonesia di Mesir inilah K.H. Abdul Fatah Hasan hidup di Mesir sebagai mahasiswa al-Azhar. Pada tahun 1933 Abdul Fatah Hasan bersama adiknya K.H. Muhamad Syadeli Hasan berkesempatan menikmati studi di Universitas al-Azhar Kairo. Keduanya duduk di Fakultas Syari"ah, sebuah fakultas yang banyak digandrungi oleh banyak pelajar asal Indonesia dan Melayu (Syibli Sarjaya, dkk, 2014: 41). Ia bersama-sama adiknya adalah salah satu di antara sekian banyak pelajar asal Indonesia yang aktif di dunia akademik dan politik sekaligus.

Seperti sudah kita singgung di atas bahwa banyak pelajar asal Asia Tenggara yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di Mesir, khususnya Ikhwan al-Muslimin, sebagian lain memang ada yang aktif di Partai Wafd. Dua partai yang mengantarkan Raja al-Faruq menduduki kursi kekuasaan monarchi Mesir. Pada tahun-tahun pertama ini gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun tampil dengan bentuk organisasi

keagamaan, sosial dan kemasyarakatan. Ketika K.H. Abdul Fatah Hasan belajar di al-Azhar aktivitas-aktivitas Ikhwan mulai memasuki ranah politik pada akhir tahun 1930- an (Adhe Nuansa Wibisono, 2011: 2).

Ada hubungan khusus antara Raj Faruq dengan Ikhwan al Muslimin di Kairo. Sebelum tahun 1928, Hasan al-Bana berdakwah di Ismailiyah, sebuah wilayah Mesir yang menjadi pusat industri Inggris. Buruh-buruh industry di Ismailiyah telah terpengaruh dakwah Hasan al-Banna. Awalnya pihak Inggris mendukung mereka untuk mendirikan masjid, tapi kemudian dakwah Hasan al-Banna dapat dirasakan cukup meresahkan, karena kaum buruh mulai berani melawan dan memiliki sikap hidup yang disiplin tinggi. Oleh karena itu Kedutaan Inggris yang berada di sana meminta kepada Raja Farouk yang saat itu memimpin Mesir untuk memindahkan Hasan Al-Banna dari Ismailiyah ke Kairo, dengan harapan agar dakwahnya mati dan tidak berkembang kembali. Raja Farouk segera memenuhi permintaan Inggris dan dipindahkanlah Hasan Al-Banna dari Ismailiyah ke Kairo. Ternyata dengan pindahnya ia ke Kairo, dakwah justru semakin berkembang dan menyebar. Pada tahun 1930 Ikhwan al-Muslimin berhasil membentuk 5 cabang, dan sampai tahun 1948 organisasi yang sudah bertransformasi menjadi partai mengklaim telah memiliki 2000 cabang di Mesir

dengan angka anggota yang fantastis satu juta orang (www.tarbawiyah.com/2018/01/24; Adhe Nuansa Wibisono, 2011: 2).

Daya tarik Ikhwan al Muslimin tidak saja menarik simpatik masyarakat Mesir tetapi juga pelajar-pelajar asal Indonesia dan sekitarnya di Asia Tenggara. K.H. Abdul Fatah Hasan pun aktif terlibat di organisasi ini dan perkumpulan pelajar asal Indonesia yang memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, khususnya Persatuan Indonesia. K.H. Abdul Fatah Hasan pun aktif menulis di surat kabar milik Ikhwan al-Muslimin. Tulisan-tulisannya di surat kabar itu semuanya menyuarakan kemerdekaan dan kebebasan. Sesuai dengan anjuran perkumpulan pelajar Indonesia, Perhimpunan Indonesia, agar para anggotanya menyuarakan kemerdekaan di seluruh penjuru dunia. Tidak saja menjadi penulis yang produktif, ia pun kerap kali diminta menjadi pembicara di radio Ikhwan al-Muslimin (Syibli Sarjaya, dkk, 2014: 42).

Mesir telah membuka pintu masa depan K.H. Abdul Fatah Hasan melalui berbagai aktifitas politik yang lebih kondusif dari pada Mekah. K.H. Abdul Fatah Hasan memiliki banyak kesempatan berkomunikasi secara intensif dengan banyak aktivis dan pemimpin pergerakan Indonesia. Dr. Soetomo saat mengunjungi Mesir bertemu dengan K.H. Abdul

Fatah Hasan sebagai anggota Perhimpunan Indonesia perwakilan Mesir. Ia banyak mendampingi Dr. Soetomo mengunjungi beberapa daerah di Mesir. Di sela-sela perjumpaannya dengan Dr. Soetomo, mereka banyak mendiskuiskan wacana kemerdekaan dengan K.H. Abdul Fatah Hasan. Ia mendesak agar Dr. Soetomo menempuh langkah strategis untuk segera mewujudkan kemerdekaan Indonesia (Syibli Sarjaya, dkk, 2014: 42).

Pada saat itu K.H. Abdul Fatah Hasan sedang aktif sebagai anggota Perhimpunan Pemuda Indonesia-Malaysia (Perpindom). Sebuah organisasi pelajar yang menghimpun pelajar-pelajar asal Asia Tenggara yang ada di Mesir bahkan menjangkau beberapa negara Arab (Mufti Ali, dkk., 2015: 78). Perpindom adalah organisasi yang didirikan oleh para pemuda asal Asia Tenggara sebagai hasil dari hubungan resmi Indonesia-Mesir yang disepakati pada tanggal 14 September 1923, ketika Pemerintah Mesir memberikan surat izin resmi No. 323 kepada mahasiswa Indonesia untuk mendirikan sebuah perhimpunan yang bergerak di bidang sosial dan politis. Selanjutnya, dalam pergerakan kemerdekaan, para mahasiswa diperbolehkan menerbitkan majalah politis, seperti *Seruan Al-Azhar, Pilihan Timur, Merdeka*, dan *Usaha Pemuda*. Persatuan Pemuda Indonesia-Malaya (Perpindom) untuk

pertama kalinya berdiri di bawah pimpinan Ismail Banda yang bergerak khusus di bidang politis. Aksi yang dilakukan adalah menolak kerja sama dengan penjajah dan mempunyai kesadaran rumpun bangsa Indonesia-Malaya. Di Saudi Arabia didirikan pula organisasi serupa Pertindom (Persatuan Talabah Indonesia-Malaya), dan di Irak didirikan Makindom atau Majlis Kebangsaan Indonesia-Malaya (Suranta Abd. Rahman, 2007: 156)

Ketika Mesir mulai menguatkan arti penting semangat nasionalisme dan pergerakan politik nasionalis Mesir mulai memiliki kekuatan, K.H. Abdul Fatah Hasan kembali ke Indonesia. Diperkirakan ia pulang ke Banten pada tahun 1939 (Syibli Sarjaya, dkk., 2014: 43). Seperti banyaknya pelajar Mesir yang pulang ke tanah air membawa semangat baru dan berperan sebagai pengendali gerapak pencerahan bagi bangsa Indonesia. Sebagian ada yang kembali ke dunia pendidikan, sebagian ke dunia politik, sebagian berkiprah di bidang keagamaan dan sosial.

E. Kembali ke Banten, Mengabdikan Ilmu di al-Khairiyah

Setelah menyelesaikan studinya di Mesir, selama kurang lebih enam tahun dari tahun 1933 sampai 1939, diperkirakan pada tahun 1939 K.H. Abdul Fatah Hasan bersama K.H.

Syadeli Hasan kembali ke Banten sebagai pelajar yang berpandangan modernis dan bersemangat nasionalisme yang tinggi. Rupanya perkembangan yang dialami K.H. Abdul Fatah Hasan membuat K.H. Syam"un, sang guru, mengaguminya dan karena kelebihan-kelebihan dan keberhasilan-keberhasilan studinya di Mesir, K.H. Syam"un memilih K.H. Abdul Fatah Hasan untuk dinikahkan dengan Nyi Sofiyah, seorang keponakan K.H. Syam"un (Syibli Sarjaya, dkk., 2014: 43).

Kemudian K.H. Abdul Fatah Hasan aktif sebagai guru di al-Khairiyah. Aktifitasnya di al-Khairiyah memang tidak begitu lama. Berdasarkan keterangan-keterangan yang dapat dihimpun, K.H. Abdul Fatah Hasan mengabdikan ilmunya di al-Khairiyah kurang lebih satu tahun setelah kepulangannya di tahun 1939. Tugas mengajarnya berakhir setelah memasuki tahun 1940 (Mufti Ali, dkk., 2015: 78). Karena tuntutan di luar pendidikan yang mendorongnya harus aktif di dunia pemerintahan dan politik mengingat pengalamannya selama di Mesir di dunia politik cukup matang. Tentu saja keterlibatannya di dunia pemerintahan dan politik ini tidak bisa dilepaskan dari peran aktif K.H. Syam"un.

BAB IV

KIPRAH DI PARLEMEN SEBAGAI ANGGOTA BPUPKI/PPKI

A. Berjuang di Parlemen

Karir pertamanya di pemerintahan ia rintis di tahun 1940-1942 di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Dalam rentang tahun tersebut K.H. Abdul Fatah Hasan menjabat anggota Dewan Kabupaten Serang (Mufti Ali, dkk., 2015: 78). Melalui mekanisme seabgaimana dilaporkan Stroomberg, setelah tahun-tahun 1930-an pemerintah Hindia Belanda mengembangkan sistem pemerintahan otonomi daerah. Salah satunya adalah dibentuknya Dewan Kabupaten, yaitu suatu badan yang sebagian anggotanya ditunjuk oleh Gubernur Provinsi dan sebagian lainnya dipilih, serta tersusun dari perwakilan tiga kelompok yang mayoritas adalah pribumi, dan bupati bertindak sebagai Presidennya (J. Stroomberg, 2018: 115).

Bisa dibayangkan betapa pengaruhnya sangat kuat, entah ditunjuk atau dipilih melalui seleksi Dewan Provinsi, yang pasti, baru beberapa tahun saja kehadirannya di Banten telah

menarik perhatian pemerintah Hindia Belanda untuk menempatkannya di Dewan Kabupaten. Tahun-tahun dimana K.H. Abdul Fatah Hasan berkarir itu adalah masa-masa di saat pemerintah Hindia Belanda tengah dikepung dari dua arah. Dari dalam negeri Gabungan Politik Indonesia mendesak agar pemerintah melakukan perubahan ketatanegaraan yang mendukung gerakan "Indonesia Berparlemen." Sebuah seruan mempersiapkan Indonesia yang merdeka demi menyelamatkan kedaulatan negara saat-saat Nederland tengah terpojokan di sudut perang dunia II dan tengah menghadapi ancaman berat dari Jepang dan Jerman (Slamet Muljana, 2008: 252-280).

Pada tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang mendarat di Teluk Tasik Bojonegara, Merak dan Carita-Anyer (Yoesoef Efendi, ttt: 40). . Tanggal 2 Maret 1942, tentara Jepang sudah masuk ke wilayah Belaraja melalui jalur Serang – Cikande – Parigi – Balaraja – Tangerang. Hanya dalam satu hari Jepang berhasil menduduki Tangerang. Tanggal 3 dikabarkan Jepang sudah sampai di Balaraja (Edi S. Ekadjati, 2004: 141). Pemerintah Belanda di Jakarta sebelum itu sudah mengumumkan bahwa Jakarta terbuka untuk menerima Jepang (Slamet Muljana, 2008: 6).

Jepang melakukan pendekatan merangkul kaum nasionalis untuk ikut memimpin rakyat Indonesia pertama-

tama melalui badan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang dipimpin oleh Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Haji Mas Mansur (Slamet Muljana, 2008: 8). Dan kemudian berbagai badan yang mengorganisasi rakyat Indonesia pun dibentuk untuk membantu kekuatan tentara Jepang. Termasuk mengangkat dari kalangan pribumi sebagai pejabat-pejabat pemerintahan di tingkat daerah. Meski pun pemerintah Jepang tetap mempekerjakan kembali mantan-mantan pejabat Hindia Belanda tentu saja yang bersedia bekerja sama dengan Jepang. Kolonel K. Matsui diangkat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan wakilnya seorang pribumi R. Pandu Suryaningrat dan Atik Suardi sebagai pembantu Wakil Gubernur. Untuk residen Banten, pemerintah Jepang mengangkat R.A. Hilman Djayadiningrat (Nina Lubis, dkk., 2014: 238).

Sekali lagi, K.H. Abdul Fatah Hasan terpilih aktif di pemerintahan. Sejak tahun 1942 sampai 1945 ia menjabat kedudukan sebagai anggota Syuu sangi kai atau Badan Keresidenan Banten. Waktu itu dewan ini beranggotakan beberapa tokoh penting di Banten K.H. Amin Jasuta, Syam"un Bakri, K.H. Ahmad Fatoni, Sutalaksana, Dr. Edi Sudewo dan lain-lain (Mufti Ali, dkk, 2015: 78). Sementara itu K.H. Syam"un aktif di Peta sejak tahun 1943 dan diangkat sebagai Daidanco di Serang sedangkan K.H. Tb. Achmad Chatib

menjabat Daidanco di Labuan (Nina Lubis, dkk, 2014: 248; Mufti Ali, dkk, 2015: 114).

Pemerintahan Jepang di Indonesia memang tidak bertahan lama. Ketika kekuatan militer Jepang di kancah internasional terdesak oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Jepang mengumumkan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia agar pada saat yang sama rakyat Indonesia bersemangat membela Jepang menghadapi perang Asia-Pasifik. Sebagai langkah konkret dibentuklah Badan Penyidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPPKI) (Slamet Muljana, 2008: 19). Badan ini untuk pertama kalinya dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan disahkan pada tanggal 28 Mei 1945 (Rabbi Chairil, 2010: 56). Untuk pertama kalinya Dr. Radjiman Wedyodiningrat mengetuai 60 anggota BPPKI dan bertugas merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar (Slamet Muljana, 2008: 19).

BPPKI dengan gencar melakukan rapat-rapat untuk usaha mempercepat kemerdekaan Indonesia. Rapat pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 dan rapat kedua pada tanggal 11 Juli 1945 dengan hasil pembentukan panitia kecil yang merumuskan tiga persoalan fundamental bagi negara: perancang UUD, perangcang perbendaharaan negara, dan perancang keuangan dan ekonomi negara. Pada

tanggal 10 Juli satu hari menjelang rapat pembentukan panitia kecil tersebut, Radjiman mengumumkan tambahan anggota BPPKI yang mewakili beberapa daerah, mereka berjumlah 6 orang yaitu K.H. Abdul Fatah Hasan dari Banten, Asikin Notonegoro, Suro Hamodjojo, M. Noor, Abdul Kifar dan Tuan Besar Dahler (Rabbi Chiril, 2010: 57). Dalam *Himpunan Risalah-Risalah Persidangan BPPPKI* Radjiman menyebut beberapa tokoh Banten yang duduk di BPPKI Ny. Maria Ulfa dan R.A. Hossein Djajadiningrat duduk di kepanitiaan Perumusan UUD. Ada pun K.H. Abdul Fatah Hasan dimasukan ke dalam penitia perumus keuangan dan perekonomian negara (BPUPKI, 1945: 185-187).

Dalam rapat besar 17 Juli 1945 K.H. Abdul Fatah Hasan aktif menyumbangkan pemikirannya. K.H. Abdul Fatah Hasan memberikan koreksi terhadap redaksi bab 10 pasal 23 ayat 2 yang menjamin kemerdekaan keberagamaan. Ia sangat memperhatikan kepentingan kaum muslimin dengan tanpa mendiskreditkan kepentingan orang lain sehingga bunyinya "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing."usulannya ini mendapat perhatian para anggota rapatSupomo, Sanusi, Dahler, Latuharhary, Wongsonegoro dan Hatta (BPUPKI, 1945: 308-311).

B. Teguh Mempertahankan Nasionalisme

Kabar menyerahnya Jepang, dan mereka sudah berkumpul di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 Chaerul Saleh mengutus empat pemuda di antara mereka adalah Abdul Muluk untuk berangkat ke Banten menemui pimpinan-pimpinan rakyat Banten. K.H. Ahmad Chatib, K.H. Syam"un dan Suriakertalegawa, seorang pejabat residen pejabat pemerintahan Jepang dan dua orang pemimpin pemuda Banten, Ali Amangku dan Ajip Dzuhri adalah tokoh-tokoh yang ditemui oleh Abdul Muluk dan kawan-kawan. Dari empat utusan Chaerul Saleh ini para tokoh Banten menerima berita penyerahan Jepang dan proklamasi kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 (Else Ensering, 1995: 149). Tanggal 18 Agustus 1945 para komandan bataliyon di Banten diminta hadir pada saat pembubaran PETA di Bogor. K.H. Ahmad Chatib, Entol Terjana, K.H. Djunaedi, dan Samanhoedi seorang wakil dari K.H. Syam"un yang sedang sakit bersama-sama bertolak dari Banten ke Bogor. Dalam suasana yang genting ini, Banten tengah mengalami kekosongan kekuasaan, mengingat Residen Banten bentukan Jepang sudah meninggalkan Banten, tanpa keterangan yang jelas (Nina Lubis, dkk, 2014: 256).

Setelah pembubaran PETA, pada tanggal 19 Agustus 1945 pemerintah pusat yang baru saja terbentuk telah berhasil menyusun struktur pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah (Nina Lubis, dkk, 2014: 256). Berdasarkan hasil pembentukan struktur pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah, pemerintahan Jepang di daerah-daerah segera melakukan penyerahan kekuasaan kepada para pemegang mandat kekuasaan pribumi yang baru terbentuk. Berbagai upacara penyerahan dan migrasi para tentara Jepang segera digelar di berbagai daerah. Pada tanggal 22 Agustus 1945 bendera Jepang diturunkan di Serang. Banyak penduduk Jepang yang sudah meninggalkan Banten sebelumnya dan berkumpul di Jakarta, mereka menghindari korban yang tidak berarti dari pihak Jepang, karena Serang sudah dipadati kerumunan rakyat Banten dari berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan pemuda. Sementara itu para pejabat pemerintahan dari kedua belah pihak menyelenggarakan pertemuan di Citangkil. Tokoh-tokoh penting Banten seperti yang sudah disebut di atas termasuk Raden Tirtasujatna, seorang residen yang dibentuk oleh pemerintah Republik. Raden Tirtasujatna dalam hal ini telah bertindak sebagai penerima mandat pemerintah pusat berdasarkan keputusan pemimpin Republik dalam pembentukan kementrian dan

provinsi pada tanggal 19 Agustus 1945 untuk menggelar serah terima kekuasaan. Di dalam pertemuan tersebut, diselenggarakanlah penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada pihak Republik yang diwakili oleh para pemimpin Banten (Else Ensering, 1995: 149; Nina Lubis, dkk, 2014: 256, 258).

Semua orang bisa menangkap ada semangat politik primordialisme yang kuat dan tengah memanas. Wacana politik perlunya sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang non-kolonial dan pemimpin pribumi segera menguat di ruang-ruang public saat itu. Menangkap ada kemungkinan terjadinya revolusi fisik di Banten untuk menyisihkan para penguasa non Banten dan eks kolonial, telah menempatkan Raden Tirtasujatna dalam perasaan terancam. Secara diam-diam ia pun meninggalkan Banten bersama sanak familinya pergi ke Bogor kota asalnya (Nina Lubis, dkk, 2014: 258). Tentu saja kaum muda telah mendapatkan momentum yang tepat membentuk suatu pemerintahan yang primordialis, Banten harus dipimpin oleh para pemimpin pribumi. Angkatan Pemuda Indonesia (API) menyelenggarakan rapat umum di Serang pada awal bulan September 1945. Dalam pertemuan tersebut beberapa pemimpin Banten dihadirkan untuk membuat beberapa kesepakatan bersama. Di antara para

pemimpin Banten yang hadir adalah K.H. Ahmad Chatib bertindak sebagai tokoh penjamin keamanan, Suriakertalegawa mewakili penguasa Jepang, dan Ali Amangku pimpinan API yang melakukan kontak langsung dengan para pemuda dan organisasi perjuangan (Else Ensering, 1995: 150).

Di dalam pertemuan itu semua unsur rakyat dan pemuda Banten mengangkat K.H. Ahmad Chatib menjadi resident Banten. Suatu kedudukan yang belum mendapat formalitas dari pemerintah pusat. Ia mendapat mandat untuk memimpin kekuatan rakyat Banten. Sekaligus menjadi orang Banten pertama yang menduduki jabatan residen (Else Ensering, 1995: 150), setelah dan sebelumnya, Banten dipimpin oleh unsur-unsur luar, termasuk residen yang ditunjuk oleh pemerintah pusat setelah serah terima kekuasaan antara pemerintah Jepang dan Republik. Sedangkan K.H. Syam"un ditunjuk sebagai pemimpin kekuatan militer Banten (Else Ensering, 1995: 150).

Untuk mengisi kekosongan jabatan residen K.H. Ahmad Chatib diangkat sebagai residen pada tanggal 10 September 1945. Suriakertalegawa, semula menjabat residen, sekarang ditunjuk menjadi asisten residen, dan beberapa bupati pun ditetapkan dalam ketetapan pemerintah pusat ini. Di antara tokoh yang ditunjuk menjabat kedudukan bupati adalah

Raden Hilman DJajadiningrat sebagai bupati Serang, Raden Djumhana bupati Pandeglang, Raden Hardiwinangun bupati Lebak, mereka semua diarahkan meneruskan tugas dan pekerjaan di masing-masing daerahnya agar mampu menjamin dan mempertahankan kemerdekaan di seluruh wilayah. Untuk melengkapi struktur pemerintahan, pemerintah Republik membentuk Komite Nasional Indonesia yang ditempatkan dari tingkat kabupaten sampai pusat. Tje Mamat adalah ketua KNI kabupaten Serang, Raden Djajarukmana ketua KNI Lebak dan Muhamad Ali KNI Pandeglang. Dalam waktu singkat K.H. Syam"un mendapat tugas membentuk Badan Keamanan Rakyat lokal yang melibatkan para pemuda dan eks-PETA, termasuk API digabungkan ke dalam satuan BKR (Else Ensering, 1995: 150). Dan K.H. Abdul Fatah Hasan menjadi anggota KNIP dan saat bersamaan menjabat wakil bupati Serang (Mufti Ali, dkk., 2015: 78).

Sebagai bagian dari proses pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke tangan pemerintah Republik di Banten, K.H. Ahmad Chatib dan bersama-sama K.H. Syam"un meminta *Keinpetai* (Polisi Militer) di Serang menyerahkan seluruh kelengkapan militer mereka kepada BKR. Kesepakatan diantara pemerintah Jepang dan pemerintah Banten pun dibuat. Keinpetai menyerahkan seluruh perlengkapan militer

Jepang kepada BKR dan sebagai imbalannya, Jepang meminta jaminan keamanan dari BKR dalam proses pengosongan wilayah Banten dari pendudukan Jepang, yang direncanakan, mereka semua akan bertolak ke Jakarta dari lapangan GORDA. Ali Amangku bekerja menyebarkan informasi kepada seluruh lapisan rakyat Banten untuk ikut menjamin keselamatan orang-orang Jepang yang akan migrasi ke Jakarta dan kembali ke tanah air mereka dengan dalih bahwa ini adalah hasil kesepakatan para kiayi dan Jepang (Else Ensering, 1995: 150).

Dalam proses pemulangan militer Jepang, terjadi insiden yang dipicu oleh kompi militer Jepang dari Sajira yang tidak mau menyatakan menyerah. Mereka tiba di GORDA dan berangkat menuju Serang dengan perlengkapan senjata. Insiden berdarah pun tidak bisa dihindarkan terjadi di Warunggunung. Kompoy mobil tentara Jepang menuju Serang dihadang oleh rakyat yang bersatu dengan BKR. B.K.R. berhasil merebut satu mobil pengangkut persenjataan dan empat orang tentara dari pihak Jepang tewas dalam insiden ini. Beritanya sampai ke tangan Kenpetaei di Serang, mereka pun menarik diri dan melanggar persepakatan sebelumnya. Dengan kekuatan yang mulai lemah di bawah tekanan yang lebih tinggi dari pada sisa kekuatan mereka, sebenarnya, tentara Jepang

pun membuat barikade dan melakukan perlawanan dengan senapan mesin yang masih di tangan mereka. Perang pun pecah di antara militer Jepang dengan B.K.R. Markas mereka pun dikepung dari segala penjuru. Pemuda, rakyat, kiayi dan para camat di sekitar Serang didatangkan ke ibu kota untuk mempersempit ruang gerak tentara Jepang dan memberi tekanan psikis yang menakutkan. Penyerbuan secara terbuka ke markas Keinpetei dilakukan pukul 9 Oktober pukul 04.30 dengan kode rahasia yang hanya dipahami antar mereka saja. Serangan terbuka ini belum bisa mendatangkan hasil, Jepang membalas serangan rakyat dengan senapan mesin, beberapa orang dari barisan rakyat Banten tewas tertembak. Keesokan harinya laskar rakyat yang dipimpin oleh Haji Muhamin, Ma"mun dan Nawi tiba memperkuat barisan pemuda. Pertempuran kembali meletus antara pukul 07.00 sampai 08.00 di markas Jepang. Hari berikutnya, Jepang menyerah, suasana berubah, kegembiraan dan keharuan pecah di pusat kota Serang, para pemuda menangis mengingat perjuangan panjang, berat dan melelahkan tidak dapat mereka lupakan dengan mudah (Else Ensering, 1995: 151).

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Himpunan *Risalah Sidang Sidang Dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 29 Mei – 16 Juni 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18-19 Agustus 1945.*

Makah dan Artikel Jurnal

Abdurahman, Suranta, Diplomasi *RI di Mesir dan Negara-Negara Arab Tahun 1947*, WACANA, VOL. 9 NO. 2, OKTOBER 2007.

Atiqah dan Sardiman, *Perhimpunan Indonesia Sebagai Organisasi Pergerakan Indonesia yang Revolusioner*

Else Ensering, Banten *in Time of Revolution,* In: Archipel, volume 50, 1995. Banten. Histoire d'une région.

Haris, Abu Hanifah dan Mohamad Redzuan Othman, Kegiatan Pelajar Melayu di Kaherah SARJANA Vol. 30, No. 1, June 2015.

_____ Pemergian Pelajar Melayu ke Mesir dari Tahun 1910 Hingga 1950-an: Cabaran dan Implikasi, Jurnal Al-Tamaddun Bil. 8 (1) 2013.

Roff, William R, Indonesian and Malay Students in Cairo in the 1920"s.

Skripsi dan Tesis

Chairul, Rabbi, Soekarno dan PErjuangan Mewujudkan Kemerdekaan RI, (Skripsi Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

Suciyani, Diskursus Tokoh Islam Dalam PErumusan Pancasial Sebagai Ideologi Negara, (Tesis Pasca Sarjan UIN SUnan Gunung Jati, 2010)

Buku Terbitan

AlI, Mufti, *Banten dan Pembaratan*, (Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2015)

_____Tahanan Banten di Boven Digul Papua (1927-1942), (Serang: Puslitpen LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2017)

_____, dkk., Biografi K.H. SYam"un (1883-1949), (Serang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banten dan Lab. Bantenologi, 2015).

_____, dkk., Perguruan al-Khairiyah: Jejak Akademis Brigjen K.H. Syam"un, Pahlawan Nasional Dari Banten, (Serang: Bhakti Banten Press dan Pemprov Banten, 2018).

_____, dkk., Matlaul Anwar dan Tantangan Modernitas, (Serang: Bhakti Banten Press, 2018).

_____, dkk., Sejarah Kota Cilegon, (Cilegon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cilegon, 2016).

_____ dan Rahayu Permana, Selayang Pandang Jejak Perjuangan Brigjen K.H. Syam"un: Pahlawan NASional Dari Banten, (Serang: Bhakti Banten Press, 2018).

_____, dkk., Biografi Ulama Banten Seri 1, (Serang: DInas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten dan Lab Bantenologi, 2014)

Djajadiningrat, P.AA., Memoar Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat, (Jakarta: Paguyuban PAA. Djajadiningrat, 1996)

Effendi, Yoesoef, Riwayat Hidup K.H. Mas Muhamad Arsyad Thawil, (Yayasan Pendidikan al-Chasanah)

Huda, Nor, Islam Nusantara: Sejarah SOsial Intelektual Islam di Indonesia, Yogyakarta: Aruz Media, 2016)

Lubis, Nina, Sejarah Banten: Membangun Tradisi dan Peradaban, (Serang: DInas Perpustakaan dan Arsip Daerah Banten, 2014)

Muljana, Slamet, Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan, Jilid 1-2, (Yogyakarta: LKiS, 2008)

Nasution, Harun, Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)

Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: UGM Press, 2011)

Syibli, Sarjaya, dkk, Prof. Dr. K.H. M. Syadeli Hasan, Ulama Pejuang, Negarawan, Akademisi dan Pemikir, Sepenggal Biografi Dalam Lintasan Sejarah Indonesia, (Bandung: Baiturahman Publisher, 2014)

Stroomberg, J., Hindia Belanda 1930, (Yogyakarta: IRISCO, 2018).

Thohir, Adjid, Perkembangan Peradaban di Kawasan DUnia Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)

Thihami, M.A dan Mufti Ali, Prosofografi Syekh Nawawi (1813-1897): Bigrafi, Genealogi Intelektual dan

Karya, (Serang: DInas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014).

Vlekke, Bernard H.M., Nusantara, Sejarah Indonesia, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010)